



UNIVERSITAS INDONESIA

PERANG YOM KIPPUR TAHUN 1973

SKRIPSI

**SAKTI IKA HANDAYANI
NPM 0606087933**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI SASTRA ARAB
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

PERANG YOM KIPPUR TAHUN 1973

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora

SAKTI IKA HANDAYANI

NPM 0606087933

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI SASRA ARAB

DEPOK

JANUARI 2010

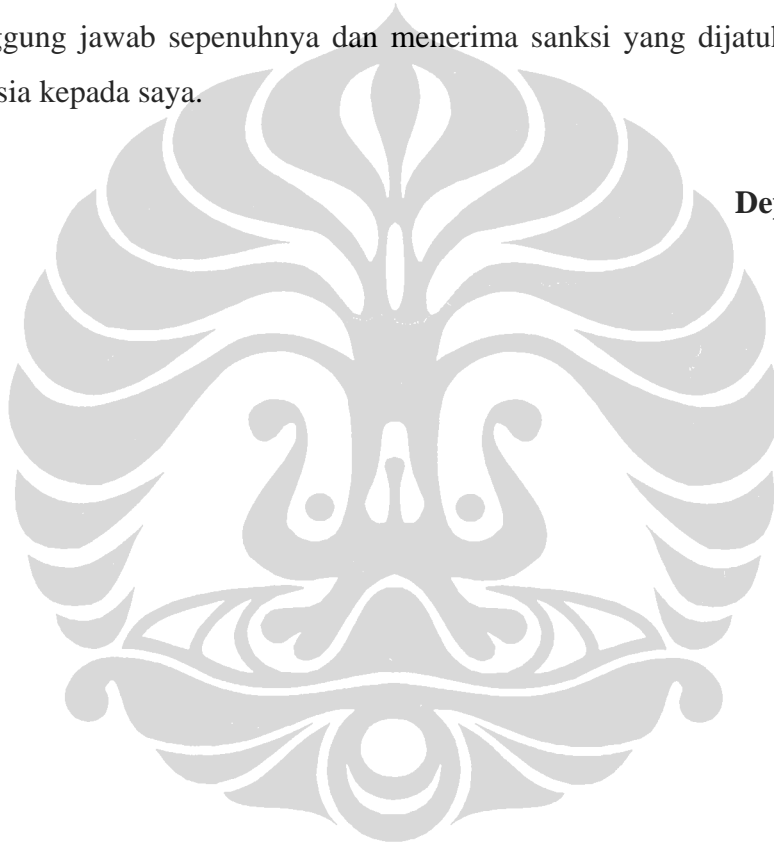
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 11 Januari 2010

Sakti Ika Handayani



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sakti Ika Handayani

NPM : 0606087933

Tanda Tangan :

Tanggal : 11 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Sakti Ika Handayani
NPM : 0606087933
Program Studi : Arab
judul : Perang Yom Kippur 1973

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Suranta, M.Hum. (.....)

Penguji : Dr. Apipudin, M.Hum. (.....)

Penguji : Juhdi Syarif, M.Hum. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 11 Januari 2010

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, M.A.
NIP 131882265

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, dzat yang Maha Sempurna yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan judul “Perang Yom Kippur Tahun 1973”.

Penulisan skripsi ini merupakan sebuah hasil kerja keras dan dukungan dari banyak pihak. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan moril dan materil dari segenap pihak tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu.

Rasa terima kasih yang besar penulis sampaikan khususnya kepada Bapak Drs. Suranta, M.Hum. selaku dosen pembimbing atas segala waktu, tuntunan, saran, masukan, dan motifasi yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada segenap Keluarga Besar Ikatan Keluarga Asia Barat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Terimakasih kepada Bapak Dr. Afdol Tharik Wastono, M.Hum. sebagai Koordinator Program Studi Arab FIB UI serta bantuan beliau dalam urusan nilai-nilai penulis yang bermasalah di SIAK NG, Bapak Dr. Basuni Imamuddin, M.A. sebagai pembimbing akademis penulis di FIB UI, Bapak Dr. Apipudin, M.Hum., Bapak Juhdi Syarif, M.Hum., Bapak Aselih Asmawi, S.S., Bapak Letmiros, M.Hum., Bapak Dr. Maman Lesmana, M.Hum., Bapak Minal Aidin A Rahiem, S.S., Bapak Dr. Muhammad Luthfi, Bapak Dr. Fauzan Muslim, M.Hum., Bapak Yon Machmudi, Ph.D., Bapak Dr. Abdul Muta'ali, Ibu Siti Rohmah Soekarba, M.Hum., Ibu Wiwin Triwinarti, M.A., dan Ibu Ade Solihat, M.A. Teman-teman Program Studi Arab UI angkatan 2006, atas dukungan dan saran kalian semua sehingga menjadi masukan yang bermanfaat bagi penulis. Teman-teman seperjuangan diantaranya, Ajeng Rizki Rahmanilah, Musrifa Ilam, Nissa Budiarti, Ratih Gumilang, dan Santi Susanti.

Rasa terima kasih yang besar kepada kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu penulis, Basuno dan Sri Murwani yang selalu mencurahkan kasih sayang dan

doa-doa mereka, dukungan moril yang menjadi penguat penulis dalam penyusunan skripsi dan dukungan materil untuk kelancaran skripsi ini. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis curahkan kepada Eyang Putri dan Tante Ambar Sukendri atas berbagai keperluan penulis dan doa yang selalu menemani.

Terima kasih yang tulus kepada para sahabat atas segala motifasi, semangat, bantuan, dan perhatian kalian semua kepada penulis. Rachim Juliwanti atas dukungan dan semangat yang tiada henti untuk selalu mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, Mutia Rany yang selalu memberi nasihat-nasihat dan informasi bermanfaat baik dalam bidang akademis maupun kehidupan penulis, Apriani atas segala doa dan perhatiannya, Aisyah Qurrota 'Ain, teman sekamar kost yang selalu menghilangkan kejenuhan dan tempat berbagi suasana, Tara Thuraya Baraja atas kata-kata penyemangat dan motifasinya yang membuat penulis bertambah semangat dalam penulisan skripsi ini, Rizki Maretno atas segala ide-idenya, Andayani Fajar Utami atas kemudahan informasi mengenai buku-buku sumber skripsi ini dan kemudahan dalam pencarian sumber di *Freedom Institute*, Fitria Rahmawati atas segala bantuannya yang sangat berarti, Mayangsari atas semangat dan pengalaman-pengalaman baru, Berta Fidiananda atas keikhlasannya mendengar keluh kesah penulis, Aniesah Hasan Syihab atas semua “perjalanan” yang menyenangkan, dan Ainul Hikmah atas semangat dan masukan kepada penulis untuk tetap dapat menyelesaikan skripsi ini di semester ketujuh. Terima kasih atas segala keceriaan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.

Akhir kata, penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Semoga kekurangan ini menjadi bahan introspeksi diri dan bekal di kemudian.

Depok, 14 Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sakti Ika Handayani
NPM : 0606087933
Program Studi : Arab
Fakultas : Ilmu Pengetahuan dan Budaya
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perang Yom Kippur Tahun 1973”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 11 Januari 2009

Yang menyatakan

(Sakti Ika Handayani)

ABSTRAK

Nama : Sakti Ika Handayani
Program Studi : Arab
Judul : Perang Yom Kippur Tahun 1973

Skripsi ini membahas Perang Yom Kippur tahun 1973 khususnya tentang strategi Mesir dalam menghadapi Israel. Penulisan ini menggunakan kerangka teori perang dalam pendekatannya dengan teori milik Clausewitz dan Quincy Wright. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada metode sejarah. Penelitian sejarah berdasarkan pada bukti-bukti dan analisa atas pembahasan mengenai suatu peristiwa. Peristiwa perang Yom Kippur pada tahun 1973 membuat Israel terkejut atas serangan dan strategi yang dilancarkan Mesir. Tujuan Mesir dalam serangan ini adalah untuk mendapatkan simpati dunia internasional atas masalah perbatasan yang hampir dilupakan oleh PBB sehingga dianggap menjadi bagian dari wilayah Israel. Serangan Mesir pada hari suci umat Israel itu mendapatkan dukungan dari berbagai negara Arab. Bukti dukungan nyata adalah adanya embargo minyak yang berdampak krisis energi dunia.

Kata kunci : Strategi, Mesir, Yom Kippur

ABSTRACT

Name : Sakti Ika Handayani
Study Program : Arabic Major
Title : The Yom Kippur War in 1973

This thesis discusses The Yom Kippur war in 1973, especially on The Egyptian strategy in dealing with Israel. The writing uses the theoretical framework of war with the basis of approach to the Clausewitz's and Quincy Wright's theories. The study applied a qualitative research based on the historical method. The study of history is based on the evidences and the analysis of the discussion of an event. The Yom Kippur War which was happened in 1973 had successfully shocked Israel over the attack and the strategy done by Egypt. The purpose of Egypt by doing this attack was to get the international sympathy over the border issue which was almost forgotten by the United Nations, hence it was considered to be part of Israeli territory. The Egypt's attack on the holy day of Israel got many supports from various Arab countries. The evidence of tangible support was the oil embargo energy crisis affecting the world.

Keywords: Strategy, Egypt, Yom Kippur

الخلاصة

الإسم : سكتى إيكأ هنديانى

القسم : اللغة العربية

الموضوع : حرب يوم الغفران عام ١٩٧٣

هذه المقالة تناقش حرب يوم الغفران عام ١٩٧٣ ، وخصوصا بشأن الاستراتيجية المصرية في تقدمها بإسرائيل. الكتابة تستخدم الإطار النظري للحرب بالقاعدة كلاوزفيتزوكوينسي رايت. هذه المقالة من البحوث نوعى و تعتمد على منهج التاريخي. دراسة التاريخية يستند إلى الأدلة والتحليل لمناقشة هذا الحدث. في حرب يوم الغفران الذي حدث في عام ١٩٧٣ قد الإسرائيلين بنجاح على مدى الاستراتيجية التي قامت بها مصر. الغرض من مصر من خلال القيام بهذا الهجوم للحصول على تعاطف دولي حول قضية الحدود التي كانت شبه منسية من قبل الأمم المتحدة ، وبالتالي فإنه ينظر إليها على انها جزء من الاراضي الاسرائيلية. ومصر من الهجوم على اسرائيل يوم مقدس حصلت يدعم العديد من البلدان العربية المختلفة. الأدلة من الدعم الملموس وكان الحظر النفطي أزمة الطاقة التي تؤثر على العالم.

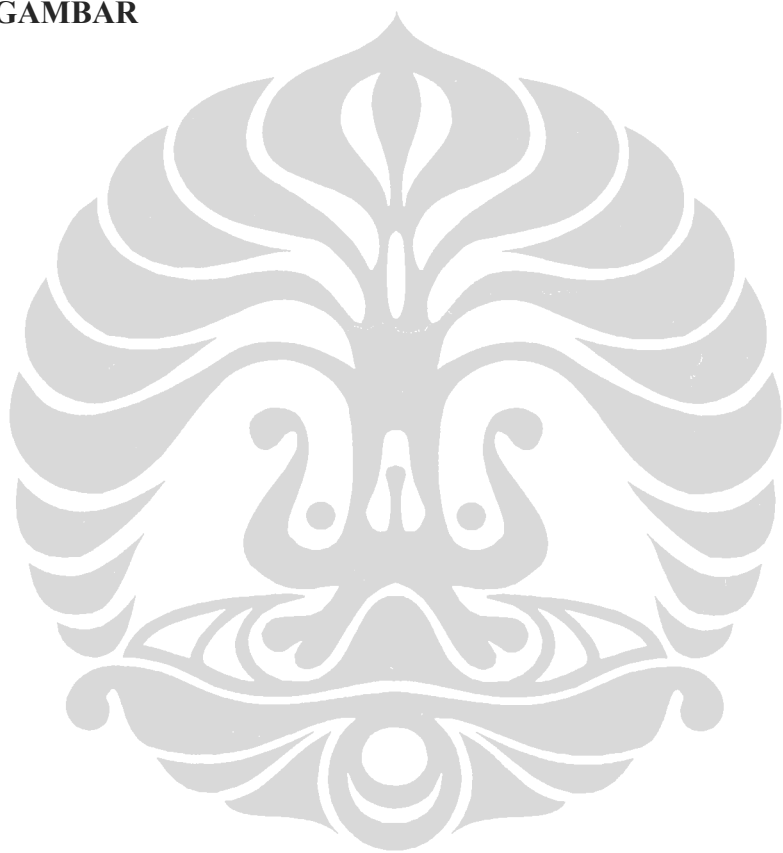
المصطلحات :

الاستراتيجية ، ومصر ، يوم الغفران

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	X
الخلاصة	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Landasan Teori	4
1.6.1 Teori Perang Clausewitz	5
1.6.2 Teori Perang Quincy Wright	6
1.7 Kajian Terdahulu	8
1.8 Metode penelitian	8
1.9 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 GEOPOLITIK MESIR	
2.1 Profil Mesir	11
2.2 Mesir pada Pemerintahan Anwar Sadat	12
2.2.1 Kebijakan Dalam Negeri	14
2.2.2 Kebijakan Luar Negeri	18
2.3 Peran Liga Arab pada Perang Yom Kippur	20
2.4 Tokoh-Tokoh Mesir pada Perang Yom Kippur	22
2.4.1 Ahmad Ismail Ali	22
2.4.2 Abdel Gani El- Gammasy	23
2.4.3 Saad El Shazly	24
2.5 Israel pada Perang Yom Kippur	25
2.6 Tokoh-tokoh Penting Israel pada Perang Yom Kippur	26
2.6.1 Golda Meir	26
2.6.2 Moshe Dayan	28
2.6.3 David Elazar	29
BAB 3 STRATEGI MESIR DALAM PERANG YOM KIPPUR	
3.1 Perang Yom Kippur 1973	30

3.2 Strategi Mesir	36
3.2.1 Keterlibatan Media Massa	37
3.2.2 Penyerangan Kejutan	39
3.2.3 Mengembargo Minyak	44
3.3 Dampak Perang Yom Kippur	48
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	
GAMBAR	



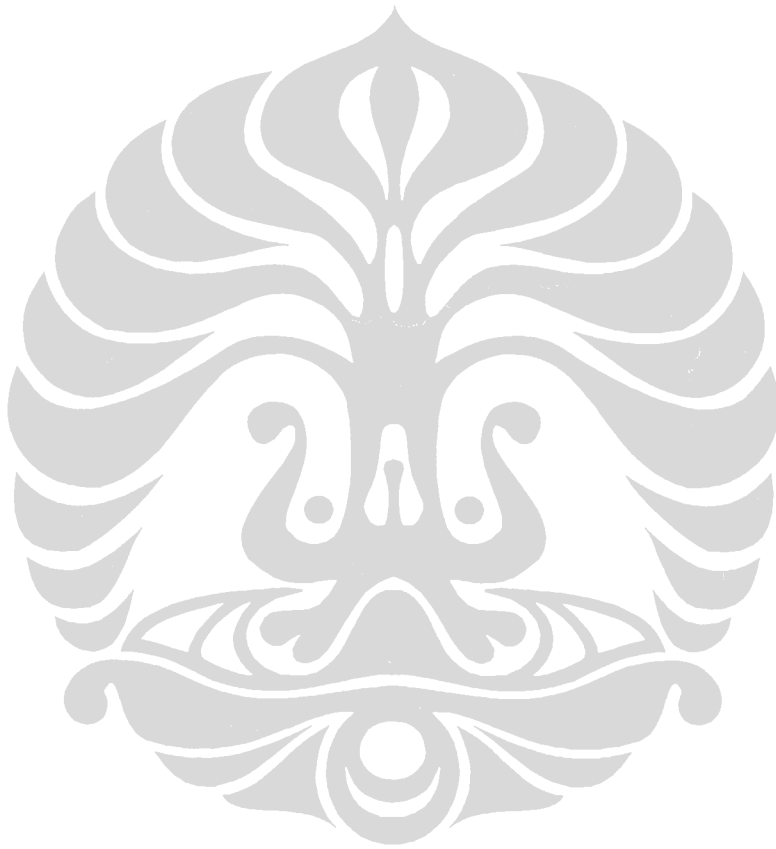
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Resolusi DK PBB No.338 1973

Lampiran 2: KTT Liga Arab Al-Jir 1973

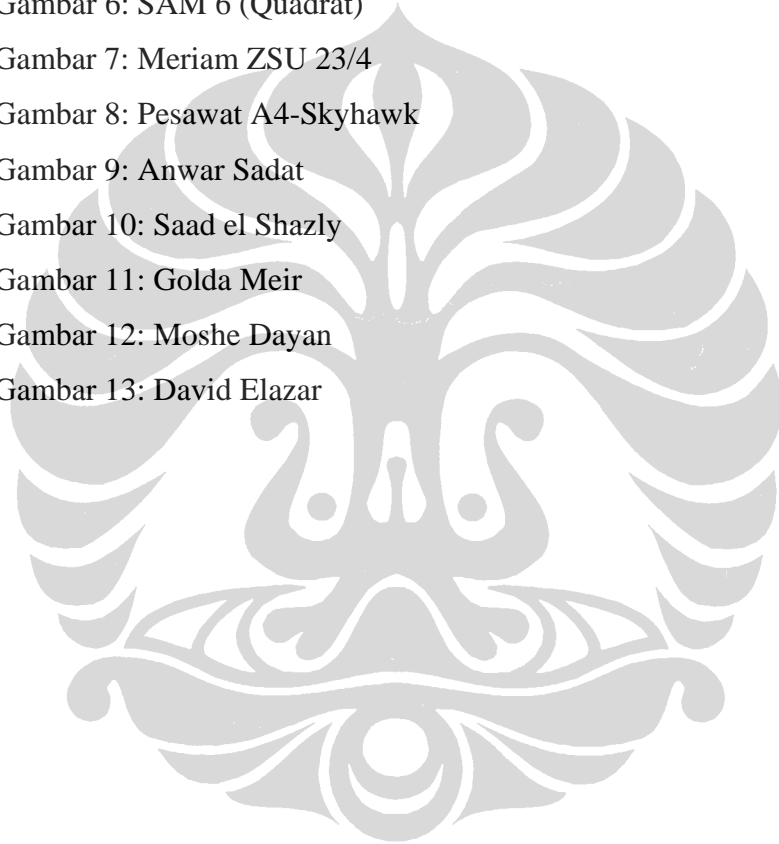
Lampiran 3: Konstitusi 11 September 1971

Lampiran 4: Konstitusi 22 Mei 1980



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Peta Mesir
Gambar 2: Peta Israel
Gambar 3: SAM 2 (Devina)
Gambar 4: SAM 2 (Volga)
Gambar 5: SAM 3 (Pectora)
Gambar 6: SAM 6 (Quadrat)
Gambar 7: Meriam ZSU 23/4
Gambar 8: Pesawat A4-Skyhawk
Gambar 9: Anwar Sadat
Gambar 10: Saad el Shazly
Gambar 11: Golda Meir
Gambar 12: Moshe Dayan
Gambar 13: David Elazar



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara-negara kawasan Timur Tengah¹ kerap kali diwarnai berbagai macam konflik dengan Israel terlebih setelah diproklamirkannya kemerdekaan Israel pada 1948. Serangkaian konflik dan peperangan yang terjadi pun melibatkan pihak-pihak lain di luar negara yang bersangkutan. Alih-alih bertujuan sebagai penengah konflik, kehadiran pihak ketiga justru sebagai pemasok senjata dan tidak jarang turut campur masalah dalam negeri negara-negara yang sedang dilanda peperangan.

Perang Yom Kippur merupakan perang keempat setelah serangkaian Perang 1948, Perang 1956, dan Perang Enam Hari (*Six Day-War* 1967), sejak berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948. Adanya keinginan untuk diakui, merupakan tujuan Israel dari serangkaian perang tersebut. Perang Yom Kippur timbul karena keinginan Mesir untuk membalas kekalahannya dalam Perang Enam Hari. Sejak tahun 1948, *a state of war*² terus berlangsung antara Israel dan sebagian besar negara-negara Arab sampai sekarang dan sumber pokok dari konflik Arab–Israel tersebut adalah masalah Palestina³.

Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara besar cenderung ambil bagian dalam konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Seperti dalam Perang Enam Hari, pengaruh Soviet tertanam kuat pada Mesir yang waktu itu di bawah pemerintahan Nasser, namun hal ini justru bertolak belakang ketika Anwar Sadat berkuasa. Sadat berkeinginan agar Mesir menjadi mandiri dalam mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Kebijakan Sadat ini kemudian

¹ Timur Tengah adalah terjemahan dari *Middle East*, suatu istilah yang sejak Perang Dunia II digunakan orang-orang Inggris dan Amerika untuk menyebutkan kawasan yang sebagian besar terletak di Asia Barat Daya dan Afrika Timur Laut. Oleh sebab itu dapat dibatasi sebagai jembatan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Lihat: Kirdi Dipotudo. *Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: Center for Strategic International Studies, 1977, hlm. 4.

² *A state of war* adalah keadaan perang dengan bangsa Arab sejak Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948 sampai sekarang. Proklamasi ini menyatakan bahwa hak kodrati dan historis bangsa Yahudi sebagai tanah yang dijanjikan adalah mendirikan negara di Palestina. Lihat: R. Garaudi:1992, hlm. 27.

³ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Masalah Palestina Sejak 1977 Sampai Sekarang*. Jakarta: Deplu, 1986, hlm. 57.

membuat Soviet tidak bersimpati kepada Mesir sehingga berpengaruh dalam urusan bantuan dalam negeri Mesir sendiri. Begitu pun Amerika yang kerap kali ikut campur kepentingan dalam dan luar negeri Israel. Berbeda dengan Soviet yang akhirnya “disisihkan” oleh Mesir, Amerika sebagai pendukung Israel mendapat sambutan yang baik dari pihak Israel.

Mesir secara geografis dan geopolitik termasuk ke dalam kawasan Timur Tengah. Beberapa tokoh penting di Mesir mempunyai pengaruh yang cukup berarti di negara-negara Arab. Salah satunya adalah Gamal Abdel Nasser (23 Juni 1956-28 September 1970) sebagai tokoh pemrakarsa Pan Arab. Beberapa waktu kemudian Pan Arab bubar karena pengaruh sosialis yang kental. Organisasi persatuan Arab yang tetap berdiri sampai sekarang adalah Liga Arab. Anwar Sadat (15 Oktober 1970-6 Oktober 1981) memegang peran penting dalam Liga Arab selama masa pemerintahannya setelah Nasser wafat. Kedua tokoh ini kerap kali ikut berperan dalam usaha pembelaan konflik Arab–Israel⁴.

Banyak pihak menganggap konflik Arab–Israel sebagai persengketaan yang tidak berujung. Tetapi tidak begitu bagi Mesir. Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir kedua beranggapan bahwa konflik Arab–Israel pasti akan menemui titik terang. Lain halnya Nasser yang berpendapat bahwa Israel harus dikalahkan melalui proses peperangan. Hal ini terbukti dengan terjadinya Perang Enam Hari⁵ pada masa Nasser, walaupun hasil akhir yang didapat adalah kekalahan. Kekalahan Mesir pada Perang Enam Hari membuatnya merencanakan perang selanjutnya untuk merebut kembali apa yang telah diambil Israel dari Mesir pada perang tersebut.

Rencana pembalasan atas kekalahan yang dialami Mesir kemudian tidak pernah terlaksana oleh Nasser karena serangan jantung yang dideritanya sehingga berujung pada kematian. Setelah kematian Nasser, kekuasaan pemerintahan dilanjutkan oleh Anwar Sadat. Sadat meneruskan rencana Nasser yang belum terlaksana, Sadat merencanakan serangan kepada Israel yang kemudian diberi

⁴ M. Riza Sihbudi, Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT Eresco, 1983, hlm. 85.

⁵ Perang Enam Hari atau Six Day-War atau Perang Arab-Israel 1967 adalah perang antara Mesir, Syria, dan Yordania melawan Israel mengenai permasalahan pendudukan Israel di Palestina dan konflik perbatasan Sinai yang terjadi selama enam hari. Perang ini berakhir dengan didudukinya Semenanjung Sinai di Mesir dan Dataran Tinggi Golan di Syria. Lihat: <http://www.hupelita.com/baca.php?id=31863>, diakses pada 20/12/09, pukul 10.17 WIB.

nama Perang Yom Kippur. Kesuksesan Mesir pada Perang Yom Kippur inilah yang kemudian dinilai oleh masyarakat Arab sebagai awal dari kemenangan bangsa Arab pada serangkaian Perang Arab-Israel⁶.

Mabuk kemenangan Israel pada 1967 telah melahirkan suatu mitos bahwa Arab untuk sekedar membuat lecet tentara Israel saja merupakan suatu kemustahilan, apalagi untuk mengalahkannya⁷. Namun ternyata situasi keterpurukan pada kekalahan di Perang Enam Hari membuat negara-negara Arab lebih bersemangat untuk bangkit dan menunjukkan pada dunia bahwa persepsi Israel salah.

Penulisan skripsi mengenai Strategi Mesir dalam Perang Yom Kippur 1973 diangkat karena belum pernah ada yang meneliti topik ini dengan sudut pandang yang sama. Selain itu, Perang Yom Kippur merupakan perang pertama dari serangkaian perang Arab-Israel yang membuat negara-negara Arab bersatu melawan kekuatan Israel dan menang di awal perang. Dengan adanya perang ini pula negara-negara Arab mulai sadar akan perlunya persatuan yang cukup kuat diantara mereka untuk dapat mengalahkan Israel.

1.2 Perumusan Masalah

Penulisan skripsi ini menitik beratkan penjelasan mengenai Perang Yom Kippur dari sudut pandang Mesir. Berikut adalah beberapa gambaran permasalahan yang akan dibahas :

1. Bagaimanakah geopolitik Mesir terhadap negara-negara Arab menjelang dan selama Perang Yom Kippur 1973.
2. Apakah strategi yang digunakan oleh Mesir untuk melawan Israel dalam Perang Yom Kipur 1973.

1.3 Tujuan Penulisan

Pembatasan masalah yang ada menghasilkan suatu tujuan penjabaran jawaban dari beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya adalah :

1. Menggambarkan bagaimana situasi geopolitik Mesir terhadap negara-negara Arab seputar Perang Yom Kippur 1973.

⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Op.Cit.* hlm. 81.

⁷ *Ibid*, hlm. 92.

2. Menjabarkan strategi yang digunakan Mesir dalam Perang Yom Kippur 1973.

1.4 Batasan Penelitian

Permasalahan yang timbul antara Arab–Israel sangatlah luas, oleh karena itu penulisan skripsi ini hanya membatasi masalah pada situasi yang terjadi di Mesir, terutama mengenai Perang Yom kippur. Namun untuk lebih mengerucutkan pembahasan dalam skripsi ini maka permasalahan dibatasi pada geopolitik Mesir di Timur tengah serta usaha-usaha yang dilakukan Mesir dalam mencapai kesuksesan strategi pada Perang Yom Kippur 1973.

1.5 Manfaat Penelitian

Perang Yom Kippur menimbulkan dampak positif bagi bangsa Arab karena keberhasilan strategi yang digunakan dalam penyerangannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai gambaran mengenai situasi politik Mesir pada masa Anwar Sadat pada tahun 1973 dan kebijakan yang diambilnya baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu juga sebagai informasi mengenai bentuk strategi yang digunakan Mesir pada Perang Yom Kippur.

1.6 Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori perang Clausewitz dan Quincy Wright. Teori perang Clausewitz yang digunakan adalah perang berdasarkan faktor moral. Sedangkan teori perang Quincy Wright yang digunakan adalah hukum sengketa perang.

1.6.1 Teori Perang Clausewitz

Definisi perang menurut Clausewitz adalah duel dalam skala besar. Dia mengibaratkan perang dalam gambaran umum sebagai pertarungan sepasang pegulat. Kekuatan yang muncul dari dalam diri kita memaksa lawan untuk menuruti kehendak kita. Perang tidak hanya sebatas kekuatan fisik, tetapi juga

terdapat kekuatan moral. Clausewitz dalam teorinya lebih mengutamakan faktor moral. Faktor moral yang dimaksud adalah kejeniusan seorang Panglima perang⁸. Kemenangan suatu peperangan ditentukan oleh strategi yang direncanakan Panglima perang. Kejeniusan itu tidak saja berasal dari ketepatan perencanaan strategi perang, tetapi juga pada perhitungan dan kepedulian seorang Panglima terhadap kondisi pasukannya sendiri, kondisi musuh yang kadang tidak dapat ditebak, dan kondisi lingkungan sekitar. Faktor moral muncul berlandaskan ketidakpastian reaksi musuh. Faktor moral menjadi penting ketika pasukan sudah berada di medan pertempuran. Strategi yang direncanakan sebelum peperangan bisa saja kacau tanpa diduga. Oleh karena itu, kejeniusan seorang Panglima perang dalam membaca situasi merupakan hal terpenting dalam mencapai kemenangan. Bahkan Jenderal yang terbaik pun menjadi penjudi sukses yang berani mempertahankan penilaian mereka. Tidak terdapat satu teori pun yang dalam saat krisis dapat mengatakan pada mereka apa yang harus dilakukan⁹.

Perang dibenarkan hanya pada saat hal tersebut rasional digunakan untuk kepentingan masyarakat luas karena kekuatan bukanlah tujuan akhirnya. Hasil akhir perang tidak selalu dianggap sebagai final karena negara yang kalah akan menganggapnya sebagai suatu tindak kejahatan. Ini adalah salah satu alasan dalam pandangan Clausewitz, mengapa kekuatan moral sangatlah penting. Namun ada alasan lain yang lebih mendasar, yaitu perang adalah sesuatu yang paling berbahaya yang mengandung ketakutan kebingungan, kekalahan dan membawa dampak negatif dalam perang sehingga hampir tidak ada seorang pun yang ingin terlibat di dalamnya. Pada telaah terakhir, Clausewitz menegaskan bahwa semua tindakan militer justru diarahkan pada kekuatan moral, bukan kekuatan fisik. Semua perang diasumsikan pada kelemahan manusia dan mereka berusaha untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Perang adalah uji kekuatan moral dan fisik yang sepenuhnya menggunakan cara-cara fisik. Selain itu, faktor fisik dapat diumpamakan sebagai sedikit lebih berharga daripada pedang kayu, sementara

⁸ Carl Von Clausewitz. *On War*. New Jersey: Princeton University Press, 1976, hlm. 83.

⁹ Michael Howard. *Clausewitz: Mahaguru Strategi Perang Modern*. Jakarta: PT Pustaka utama Grafitti, 1993, hlm. 38.

faktor moral adalah logam mulia, senjata yang sesungguhnya, pedang yang diasah dengan tajamnya¹⁰.

Tidak ada satu pun keberhasilan militer yang dapat dinilai secara terpisah, karena keberhasilan tersebut hanya merupakan satu tahap dalam keseluruhan rencana perancang strategi. Sasaran yang harus dicapai kesatuan-kesatuan di tingkat bawah –merebut jembatan atau benteng, menaklukkan suatu wilayah, menghancurkan pasukan musuh– merupakan cara bagi sang Jenderal untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan pada tingkatan tertinggi tujuan itu sama sekali tidak bersifat militer, melainkan politis, tujuan yang langsung menuju ke perdamaian¹¹. Begitu pula yang dilakukan oleh Mesir. Perencanaan strategi oleh jenderal-jenderal Mesir dan kebijakan Presiden Anwar Sadat untuk menyerang Israel pada hari suci Yom Kippur mengindikasikan pengetahuan Mesir terhadap kelemahan Israel. Keberhasilan strategi Mesir yang melihat kelemahan Israel pada saat perayaan keagamaannya merupakan hal penting. Penaklukan Benteng Bar Lev dan keberhasilan tentara Mesir melakukan serbuan ke Israel adalah tujuan dari strategi Mesir. Keberhasilan tujuan tersebut didasarkan pada tujuan politik Mesir untuk sebuah perdamaian dan pengakuan wilayah, setelah Perang Enam Hari diabaikan oleh PBB.

1.6.2 Teori Peran Quincy Wright

Quincy Wright, mengkategorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang, yaitu:

- (1) Perang yang dilakukan oleh binatang (*by animals*). Perang jenis ini terjadi pada zaman purba, ketika hewan-hewan masih mendominasi kekuatan dunia. Biasanya perang terjadi karena perebutan makanan dan tempat tinggal.
- (2) Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (*by primitive men*). Setelah zaman hewan purba, kekuasaan beralih pada manusia. Akan tetapi peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada hakikatnya tujuan perang yang dilakukan oleh manusia purba hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh hewan purba, yaitu permasalahan tempat tinggal dan makanan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 41.

¹¹ *Ibid*, hlm.143.

(3) Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (*by civilized men*). Manusia beradab dikategorikan ke dalam kehidupan yang sudah lebih baik dan teratur ketimbang manusia primitif. Manusia beradab sudah memiliki peralatan persenjataan yang memadai dalam berperang. Pada masa ini, persengketaan perang sudah dikenal. Suatu kelompok yang kalah dalam peperangan akan menjadi tawanan bagi kelompok lainnya. Tawanan perang inilah yang kemudian dirampas harta benda dan persenjataan yang dimilikinya.

(4) Perang yang menggunakan teknologi modern (*by men using modern technology*)¹². Perang modern terjadi dengan menggunakan alat-alat perang canggih, diantaranya adalah meriam, tank, dan rudal. Pada pengoperasian artileri perang yang menggunakan peralatan berat, persengketaan senjata kemungkinan besar terjadi.

Hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional merupakan sekumpulan pembatasan oleh Hukum Internasional dalam hal kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh yang boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata¹³.

*“Every Society continually on the brink of conflict. It must continually adapt its organization and its policy to changing conditions of internal opinions and external pressures”*¹⁴.

“Setiap masyarakat harus terus menerus berada di ambang konflik. Ini mengharuskan penyesuaian yang berkelanjutan dan perubahan kebijakan kondisi dari pendapat internal dan tekanan dari luar”.

Dari pendapat Quincy Wright tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap masyarakat baik antara pemerintah dan rakyat, antara rakyat dengan rakyat, juga antara negara dengan negara akan terlibat dalam suatu persengketaan. Itulah alasan mengapa permasalahan itu terjadi, meliputi konflik dalam bidang ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, agar kita dapat menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang berubah¹⁵.

¹² http://wapedia.mobi/en/Quincy_Wright, diakses pada 12/12/2009, pukul 03.09 WIB.

¹³ Michael Howard, *Op.Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://omuyung.blogspot.com/2009/03/kemungkinan-ancaman-aktual-dan.html>, diakses pada 12/12/09, pukul 15.44 WIB

Campur tangan Amerika dan Uni Soviet dalam perang Yom Kippur berdampak pada perang persenjataan antara Mesir-Israel. Perang Yom Kippur menjadi ajang persaingan senjata canggih antara Amerika dan Uni Soviet. Pasokan persenjataan yang disuplai dari Amerika ke Israel atau dari Uni Soviet ke Mesir berupa alat-alat berat, meriam, rudal, dan payung udara. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan senjata. Penggunaan persenjataan tersebut juga harus dilandasi oleh moral yang baik. Tujuan digunakannya Hukum Humaniter dalam Perang Yom Kipur adalah untuk menghindari penghancuran suatu wilayah secara berlebihan dan brutal. Selain itu, hukum ini juga bertujuan untuk pembatasan persenjataan yang digunakan Arab-Israel.

1.7 Kajian Terdahulu

Penulisan skripsi ini menggunakan dua buku sebagai tinjauan penelitian. Buku pertama berjudul *Masalah Palestina Sejak Tahun 1977 Sampai Sekarang*, terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, tahun 1986. Buku ini berisi akar permasalahan Palestina sejak kemerdekaan Israel pada 1948 dan perang-perang yang terjadi setelah itu. Di dalam buku ini terdapat salah satu judul, yaitu Perang 1973 yang berisi kronologis Perang Yom Kippur tahun 1973 antara Mesir dengan Israel.

Buku kedua yang digunakan sebagai tinjauan penelitian berjudul *Why Nation Go To War, Sixth Edition* karangan John G. Stoessinger tahun 1993. Buku ini berisi tentang beberapa peperangan yang terjadi di dunia, salah satunya adalah Perang Yom Kippur. Pembahasan mengenai Perang Yom Kippur pada buku tersebut terbatas pada proses jalannya perang dan perdamaian yang dilakukan setelah perang. Namun, buku tersebut lebih banyak membahas mengenai proses perdamaian antara Arab-Israel.

Perbedaan kedua buku tersebut dengan skripsi ini adalah segi pembahasan dan pembatasan masalah. Buku pertama membahas kronologis Perang Yom Kippur, buku kedua berisi proses perdamaian Arab-Israel, sedangkan skripsi ini membahas Perang Yom Kippur dari sudut pandang Mesir. Pembahasan mengenai

strategi yang digunakan Mesir untuk menerobos pertahanan Israel menjadi inti dari skripsi ini.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode historis atau dapat juga disebut dengan metode sejarah. Metode sejarah adalah mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau¹⁶. Data-data yang berkaitan dengan isi skripsi dikumpulkan dan disusun berdasarkan waktu yang mendahuluinya untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kasus (*case study*). Oleh karena itu penelitian bersifat kualitatif. Data dan sumber yang diperoleh melalui hasil dari studi pustaka (*Library Research*) di beberapa tempat. Dengan adanya analisa data dan sumber dari tempat yang berbeda, maka analisa yang dilakukan diharapkan mendapatkan hasil yang akurat.

Metode pengumpulan bahan pada penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan beberapa teknis. Teknis pertama adalah pengumpulan objek. Semua objek yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan baik dari buku-buku maupun dokumen yang lainnya. Setelah melakukan pengumpulan objek lalu dilakukan penyeleksian data. Penyeleksian terhadap objek bertujuan untuk memilah mana saja data yang perlu digunakan sebagai penelitian dan mana saja data yang sekiranya dibuang. Penyeleksian ini kemudian berlanjut pada penyingkiran beberapa data yang dianggap kurang valid. Setelah data diseleksi, kemudian disusun berdasarkan urutan permasalahan. Penyusunan data ini dilakukan agar data yang telah terpilih dapat dibuktikan secara susunan kejadian. Langkah terakhir dari penyusunan data adalah kesimpulan. Setelah penelitian selesai disusun maka disimpulkan oleh peneliti apa saja hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung hingga selesai.

Penelitian skripsi ini banyak mengambil bahan dan sumber data dari beberapa perpustakaan serta tempat-tempat yang berhubungan dengan penelitian. Bahan-bahan penelitian diambil dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Hubungan Internasional Fakultas

¹⁶ Dudung Abdurahman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Ar-Ruz Media, 2007, hlm. 63.

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Perpustakaan Miriam Budiardjo Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Perpustakaan *Freedom Institute*, Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Ilmiah, tesis, jurnal ilmiah, artikel, majalah dan media massa serta data-data yang berkaitan dengan Perang Yom Kippur 1973.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas empat bab. Bab I atau bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, batasan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang terbagi atas teori perang Clausewitz dan teori perang Quincy Wright, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang geopolitik Mesir yang memiliki sub bab profil Mesir, Mesir pada pemerintahan Anwar Sadat, kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri, peran liga Arab untuk Mesir, tokoh-tokoh Mesir yang berpengaruh dalam Perang Yom Kippur yaitu Ahmad Ismail Ali, Abdel Gani el Gammasy, dan Saad el Shazly. Sub bab selanjutnya adalah Israel pada Perang Yom Kippur, dan tokoh penting Israel pada Perang Yom Kippur, diantaranya adalah Golda Meir, Moshe Dayan, dan David Elazar.

Bab III berisi strategi Mesir pada Perang yom Kippur dan memiliki sub bahasan Perang Yom Kippur 1973, strategi Mesir yang terbagi atas keterlibatan media massa, penyerangan kejutan, dan mengembargo minyak. Sub bab terakhir adalah dampak Perang Yom Kippur.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran, dan daftar gambar terdapat di luar bagian dari bab empat.

BAB 2

GEOPOLITIK MESIR

2.1 Profil Mesir

Mesir terletak di sudut Timur Laut benua Afrika dan sebagian kecil wilayahnya terletak di benua Asia, yaitu semenanjung Sinai. Mesir berbatasan dengan dua lautan, sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Kedua lautan ini dihubungkan oleh terusan Suez yang memisahkan benua Afrika dan Asia¹⁷. Mesir menempati posisi yang strategis di antara tiga benua: Afrika, Asia, dan Eropa. Letak yang memanjang, dari pinggiran Laut Merah sampai Laut Tengah, dan dihubungkan oleh Terusan Suez, menjadikan Mesir sebagai daerah yang ramai dikunjungi kapal-kapal asing. Dapat dikatakan, Mesir adalah pintu gerbang dari barat menuju ke Timur Tengah dan Timur Jauh. Secara geografis, Mesir terletak di antara 24°-36,55° bujur timur dan garis 22°-31,5° Lintang Utara¹⁸.

Luas wilayah Mesir ± satu juta km², sedangkan daerah yang dihuni oleh penduduk hanya 35.580 km² atau sekitar 3,6% dari seluruh wilayahnya. Dari jumlah penduduk ini sekitar 25% bermukim di Cairo dan sekitarnya, sisanya di berbagai kota dan desa. Sejak masa Firaun, Sungai Nil menjadi sumber utama dalam kehidupan dan budaya masyarakat Mesir. Masih teringat ucapan Herodotus¹⁹: “*Egypt is the gift of the Nile*”, yang berarti eksistensi Mesir adalah berkat sungai Nil²⁰.

Secara geografis, posisi Mesir memudahkan terjadinya interaksi antarbudaya di kawasan Laut Tengah, khususnya Yunani dan Romawi kuno. Yunani dan Romawi Kuno ini merupakan pusat budaya yang mempengaruhi peradaban dan kebudayaan Eropa. Di Mesir, terdapat peninggalan masa

¹⁷ Riza Sihbudi, dkk. *Profil Negara Timur Tengah*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm. 143.

¹⁸ Riza Sihbudi, dkk. 1983, *Op.Cit*, hlm. 85.

¹⁹ Herodotus adalah sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-lima SM. Dia dikenali sebagai bapak Sejarah. Karyanya yang terkenal adalah *Histories* yang berisi tentang Perang Persia pertama dan kedua serta berbagai informasi mengenai Mesir kuno. Lihat: <http://www.mnsu.edu/emuseum/prehistory/egypt/history/people/herodotus.html>, diakses pada 22/12/09, pukul 14.03 WIB.

²⁰ Riza Sihbudi, dkk. 1995, *Op.Cit*, hlm. 144.

pendudukan Romawi seperti terlihat pada berbagai peninggalan di kota Alexandria. Masuknya agama Kristen pada abad pertama membawa pengaruh tersendiri, dan sejak saat itu Mesir dengan gereja-gerejanya yang khas pun menjadi salah satu pusat penyebaran agama Kristen di Afrika.

Keterlibatan Mesir dalam empat peperangan Arab–Israel (1948-1949, 1956, 1967, 1973) bukan saja menjadi beban berat bagi pembangunan perekonomiannya, tetapi juga mengakibatkan terlantarnya usaha Mesir guna menata kembali birokrasi yang tidak efisien beserta sarana perekonomiannya²¹. Mesir adalah negara besar dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, Mesir juga pelindung negara-negara Arab atas keterlibatan Mesir dalam prakarsa persatuan negara-negara Arab.

2.2 Mesir Pada Pemerintahan Anwar Sadat (1970-1981)

Anwar Sadat adalah putra Mohamed Mohamed El-Sadaty. Nenek Sadat adalah Sitt Om-Mohamed El-Sadatieh, dan sebelum ia melahirkan putera tunggalnya, dia telah punya empat orang puteri. Sesuai dengan adat, meskipun dia belum melahirkan seorang putra, dia sudah dikenal sebagai “ibunya putra yang diharapkan”, “*Om-Mohamed*”, ibu Mohamed²².

Sadat lahir dari keluarga yang berpoligami. Ibunya adalah seorang budak Mesir berkulit hitam dan sering mendapat perlakuan tidak adil dalam keluarga. Ibunya, Sadat, dan anak-anak dari ibunya sering mendapat perlakuan tidak baik dari ayah dan neneknya. Berbagai perlakuan buruk ini disebabkan oleh perbedaan warna kulit mereka. Keterpurukan yang dialami Sadat dan empat orang saudaranya membuat mereka harus berjuang sendiri meraih masa depan. Namun keadaan ini justru membuat Sadat bangkit dan mengangkat nama keluarga mereka. Sadat masuk sekolah militer dan bertemu dengan Gamal Abdel Nasser yang akhirnya menjadikannya sahabat hingga mereka duduk di kursi pemerintahan²³.

²¹ Riza Sihbudi, dkk. 1995, *Ibid*, hlm. 145.

²² Anwar Sadat. *Tokoh-Tokoh Pemimpin Yang Saya Kenal*. Terj. Ermas. Jakarta: Pustaka Jaya, 1987, hlm. 5.

²³ *Ibid*, hlm. 7.

Pengangkatan Anwar Sadat sebagai presiden menyusul wafatnya Nasser merupakan periode baru bagi Mesir, khususnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Tidak lama sesudah diangkat sebagai presiden, Sadat melakukan gerakan ‘pembersihan’ terhadap anasir ‘sayap kiri’ yang pro-Soviet. Seiring dengan tindakan itu, Sadat segera melancarkan kebijakan *infitah*²⁴ (pintu terbuka) sebagai permulaan liberalisasi di bidang ekonomi. Prakarsa baru oleh Sadat ini menghadapi tantangan keras dari golongan Nasser (sosialisme Arab²⁵) yang berorientasi kerakyatan dan didukung oleh mahasiswa dan kaum buruh. Mereka menganggap liberalisasi ekonomi hanya akan menguntungkan golongan kelas menengah dan ‘orang kaya baru’. Sedangkan Sadat berpendapat, bahwa sulit bagi Mesir untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negerinya tanpa membuka pintu untuk investasi modal asing. Menghadapi tantangan dari dalam negeri itu, Sadat terpaksa melanjutkan hubungan dengan Uni Soviet, walaupun tidak seerat di masa Nasser²⁶, dengan tetap bertindak hati-hati.

Hubungan Mesir–Soviet yang mulai merenggang membuat Sadat “dimusuhi” oleh orang-orang pengikut Nasser, baik di pemerintahan maupun di kalangan bawah. Pemerintahan Sadat yang lebih terbuka dan terkesan plin-plan ini banyak menuai kontroversi di berbagai kalangan. Para pendukung Nasser menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Sadat bukanlah jalan keluar dari keterpurukan perekonomian Mesir. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan pihak Barat dinilai memperluas jurang perekonomian masyarakat Mesir.

Perang Yom Kippur telah membuat nama Sadat menjulang. karena keberhasilan tentara Mesir menyeberangi Terusan Suez dan menghancurkan benteng pertahanan Israel yang disebut *Bar Lev Line*²⁷ (benteng ini dibangun

²⁴ *Infitah* adalah politik pintu terbuka di Mesir. Kebijaksanaan ini dikeluarkan oleh Presiden Anwar Sadat pada awal tahun 1970-an. Politik ini bertujuan untuk melakukan kerjasama perusahaan-perusahaan lokal dengan perusahaan asing. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dari liberalisasi ekonomi Mesir, Lihat: <http://es.oxfordjournals.org/cgi/content/full/khn002v1>, diakses pada 22/12/09, pukul 15.07 WIB.

²⁵ Sosialisme Arab adalah Ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha agar harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara dan bersumber dan mencerminkan tradisi Islam, bukan Sosialis Barat/ Komunis, Lihat: Kirdi Dipoyudo. *Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia*. Jakarta: Center for Strategic International Studies, 1981, hlm. 20.

²⁶ Riza Sihbudi dkk. 1995, Op.Cit, hlm. 156.

²⁷ *Bar Lev Line* (Benteng Bar lev) adalah garis pertahanan terdepan Israel ditepi terusan Suez yang dibuat pada bulan Maret 1969. *Bar Lev Line* diambil dari nama penggagasnya, yaitu Kepala Staf Letnan Jenderal Chaim Bar Lev. *Bar Lev Line* dibuat dengan menguruk tepi Terusan Suez dengan

sedemikian rupa kuatnya sehingga dianggap tidak mungkin ditembus oleh serangan musuh). Peperangan yang oleh Sadat ditegaskan sebagai konfrontasi terbatas tidak berakhir dengan kemenangan di pihak Mesir. Akan tetapi, tujuan utama Sadat untuk melibatkan Amerika Serikat dalam usaha penyelesaian persengketaan Arab–Israel tercapai. Sadat beranggapan bahwa hanya Amerika Serikat yang dapat mendorong Israel untuk melaksanakan perundingan perdamaian. Dengan Perang Yom Kippur ini bukan saja berhasil menyeret Amerika Serikat ke dalam usaha penyelesaian sengketa Arab–Israel, melainkan juga Uni Soviet dan sejumlah negara Eropa terkemuka²⁸.

Sadat sendiri sejak semula berpendapat, bahwa peran utama untuk menyelesaikan sengketa Arab–Israel harus dilakukan oleh Amerika Serikat, mengingat keberpihakan Amerika Serikat pada Israel yang nyaris tanpa syarat dan sewaktu-waktu siap memberikan dukungan militer pada Israel. Perang Yom Kippur pun dijadikan bukti oleh Sadat, betapa cepat Amerika Serikat memasok persenjataan mutakhir bagi Israel. Maka Sadat cenderung mendorong Amerika Serikat untuk lebih aktif berperan serta melibatkan diri secara langsung dalam usaha penyelesaian sengketa Timur Tengah umumnya. Walaupun keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Soviet seringkali mempersulit usaha penyelesaian masalah yang sebenarnya (sengketa Arab–Israel), karena kedua kekuatan tersebut mempunyai kepentingan masing-masing untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah Timur-Tengah. Tetapi, Sadat pun lebih cenderung menerima dilakukannya diplomasi bolak-balik oleh Henry Kissinger sebagai usaha perintisan jalan menuju terselenggaranya perundingan perdamaian²⁹.

2.2.1 Kebijakan Dalam Negeri

Babak baru politik Mesir dimulai bersamaan dengan kematian Nasser, tanggal 29 September 1970, digantikan oleh Anwar Sadat. Setahun setelah Sadat berkuasa, konstitusi baru diundangkan. Konstitusi ini kemudian diamandemen pada tanggal 11 September 1971. Pada tanggal 22 Mei 1980, konstitusi yang sama

jutaan ton tanah dan pasir sehingga membentuk perbentengan. Lihat: Angkasa Edisi koleksi *The Yom Kippur War October 1973*. No.XLII 2007, hlm. 11.

²⁸ Riza Sihbudi dkk. 1995, Op.Cit, hlm. 157.

²⁹ *Ibid*, hlm. 158.

diperbaiki dengan Referendum. Menurut konstitusi 1971, Mesir adalah Negara republik dengan sistem multi partai (pasal 5). Kekuasaan berada di tangan rakyat (pasal 3), Islam adalah agama resmi negara dan syariat Islam adalah sumber perundang-undangan. Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara (pasal 2). Disamping itu, secara tegas dijelaskan bahwa Republik Arab Mesir adalah sebuah negara demokrasi dan sosialis yang berdasarkan kepada aliansi kekuatan pekerja rakyat (pasal 1)³⁰.

Situasi politik Mesir pada masa pemerintahan Nasser terkendali sehingga hanya terdapat satu partai politik. Namun pada periode Sadat barulah muncul beberapa partai politik baru dan semakin berkembang setelahnya. Sistem pemerintahan liberal yang dijalankan Sadat berupaya untuk menghapuskan komunis yang melekat di Mesir.

Kepala Negara Mesir adalah seorang Presiden (*Rais al-Jumhiiriyya*) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan (*Majelis al-sha'ab*) dan disahkan dengan Referendum oleh rakyat. Masa jabatan Presiden adalah enam tahun sejak hasil Referendum diumumkan dan dia dapat dipilih kembali. Di samping sebagai Kepala Negara, Presiden juga merupakan Kepala Pemerintahan dan Panglima Angkatan Bersenjata. Presiden berhak mengangkat satu atau beberapa Wakil Presiden (*Naib Rais al-Jumhuriya*) yang dapat bekerja sama dengannya. Jika dikehendaki, mereka dapat dipecat oleh Presiden. Dia juga berhak mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri (*Rais al-Wuzara'*), Deputy Perdana Menteri (*Naib Rais al-Wuzara*), Menteri (*Wuzara*), Deputy Menteri (*Naib al-Wuzara'*), dan para Gubernur³¹.

Uni Sosialis Arab yang sebelumnya mendominasi seluruh kehidupan politik, pada masa Sadat dipecah menjadi tiga partai politik. Ketiga partai politik tersebut adalah Partai Uni Nasional Progresif (*Hizb al-Tajammu al-Wathani al-Wahdawi-The Uni National Progressive Party*), Partai Sosialis Liberal (*Hizb al-Ahrar al-Isytirakiyyin-The Liberal Socialist Party*), dan Partai Sosialis (*Hizb al-Isytirokiyah-The Socialist Party*). Mereka mewakili aliran “kiri”, “kanan”, dan “tengah”. Pada tahun 1978, Sadat membuat partai politik baru, yaitu Partai Nasional Demokratik (*Hizb al-Wathani al-Dimuqrati* atau *The National*

³⁰ *Ibid.*

³¹ M. Riza Sihbudi dkk. 1983, *Op.Cit*, hlm. 90.

Damokratik Party/NDP). Dengan munculnya partai politik baru ini, semua anggota Partai Sosialis pindah dan menjadi anggota NDP. Partai Sosialis dan pimpinannya, Mamdouh Salem, akhirnya terlupakan dari kehidupan politik Mesir. Berdirinya NDP ini berdasarkan Undang-Undang No.40 th. 1977 tentang Partai politik³².

Undang-Undang No.40 tahun 1977 merupakan penjabaran dari pasal 5 konstitusi 1971 yang menghendaki berlakunya sistem multi partai. Menurut Undang-Undang di atas, setiap orang Mesir boleh mendirikan partai politik asalkan memenuhi syarat-syarat berikut, *pertama*, dasar, program, tujuan, kebijaksanaan, dan cara yang digunakan partai tidak bertentangan dengan syariat Islam; prinsip Revolusi 23 Juli 1952 dan 15 Mei 1971; persatuan nasional, perdamaian sosial dan sistem sosial demokrat. *Kedua*, program dan kebijaksanaan partai berbeda dengan partai lain. *Ketiga*, program dan dasar partai tidak mengacu kepada satu kelas, faksi, profesi, asal daerah, ras, atau agama. *Keempat*, partai bukan merupakan bagian dari organisasi militer atau para militer. *Kelima*, partai tidak berfungsi sebagai cabang partai politik di luar negeri³³.

Keliberalan Sadat di bidang politik hanya sampai pada struktur formalnya saja. Realitas sehari-hari hampir sama dengan zaman Nasser. Partai politik selain NDP memang ada, tapi mereka dibuat sedemikian rupa, sehingga perjalanan hidupnya tidak dapat mencerminkan dan mewakili pengikutnya. Partai politik lain hanya digunakan untuk menunjukkan, bahwa Mesir tidak menganut sistem partai tunggal sebagaimana yang dianut Nasser. Sadat ingin menampakkan perbedaannya dengan Nasser³⁴.

Pembentukan opini politik di Mesir sangat dipengaruhi oleh pers, yang di Mesir dianggap sebagai otorita ke-4 disamping tiga otorita lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mesir memang memiliki tradisi kebebasan pers dan kebebasan pers dijamin dan dilindungi secara konstitusional. Kebebasan pers itu dirumuskan sebagai berikut:

“Freedom of the press, printing, publication, and mass media shall be guaranteed. Censorship on newspapers is forbidden as well as notifying, suspending or cancelling them by administrative methods. In a state of

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm. 95.

³⁴ *Ibid*, hlm. 94.

*emergency or in time of war a limited censorship may be imposed on the newspapers, publication and mass media in matters related to public safety or purposes of national security in accordance with the law*³⁵.

“Kebebasan Pers, percetakan, publikasi, dan media masa akan dijamin. Sensor koran-koran dilarang serta pemberitahuan, penangguhan, dan pembatalannya dengan metode administratif. Dalam pernyataan darurat atau masa perang, pembatasan sensor boleh digunakan di koran-koran, percetakan, publikasi, dan media massa dalam kaitannya dengan keselamatan publik atau tujuan keamanan nasional yang sesuai dengan hukum.”

Kebebasan pers inilah yang membantu Mesir dalam Perang Yom Kippur. Pers Mesir dan media massa Perancis yang ada di Mesir banyak memberitakan formasi tentang keadaan pasukan dan militer Mesir yang kondisinya semakin memburuk setelah Perang Enam Hari. Amerika dan Israel yang mengikuti perkembangan Mesir mempercayai berita itu dan menganggap dampak Perang Enam Hari membuat Mesir tidak dapat melancarkan serangan balasan kepada Israel. Pernyataan Sadat dalam beberapa harian Mesir pun menggambarkan situasi Mesir yang tidak stabil karena kehilangan para Jenderal terbaik dan perwira-perwira muda Mesir yang tidak setangguh pada Perang Enam Hari. Selain kondisi militer yang menurun, politik dalam negeri Mesir saat itu juga sedang dalam masa peralihan. Hal yang semakin memperkuat asumsi Israel untuk tidak diserang Mesir ialah melihat pada kondisi perekonomian Mesir yang hancur juga karena dampak Perang Enam Hari.

Kebijakan dalam negeri Mesir sendiri pada masa Sadat banyak menimbulkan kontroversi. Pertumbuhan partai-partai politik yang terus meningkat membuat organisasi keagamaan juga menjamur dan tidak jarang bertindak radikal.

Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik dalam negeri Mesir tidak banyak liku-likunya; memang sesekali terjadi gerakan yang bersifat radikal dan menuntut perubahan fundamental di dalam negeri, akan tetapi gerakan demikian itu masih dapat dikendalikan, terkadang dengan cara tangan besi. Tapi bagaimanapun juga Mesir tidak dapat mengabaikan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh gerakan yang berorientasi keagamaan, yang sudah berulang kali melakukan tindakan kekerasan dalam negeri. Namun demikian, yang menjadi

³⁵ Riza Sihbudi, dkk. 1995. *Op.Cit*, hlm. 150.

tantangan utama bagi pemerintah Mesir ialah pembangunan ekonomi dalam negerinya. Sebab sekalipun sudah mendapat bantuan baru dari luar negeri dan pemutihan utang luar negerinya, Mesir harus berusaha untuk mencapai selekasnya tahap lepas-landas bagi pertumbuhan perekonomiannya dengan memperlancar masuknya modal asing serta mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendukung proses industrialisasi³⁶.

Masalah-masalah yang dihadapi Mesir dari dalam di kemudian hari sedikit terabaikan karena persiapan Sadat dalam menghadapi Perang Yom Kippur. Kemerosotan ekonomi yang sedang melanda Mesir belum sempat terselesaikan karena ditambahnya hutang-hutang luar negeri untuk membiayai perang 1973.

2.2.2 Kebijakan Luar Negeri

Mesir tergolong negara Arab yang berperan penting sebagai salah satu aktor politik yang berpengaruh terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel yang berintikan masalah Palestina. Peran Mesir itu dapat diamati dalam beberapa lingkaran yang secara konsentris berurutan dari dalam, yaitu masing-masing Liga Arab (LA), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Persatuan Afrika (OPA), dan Gerakan Non Blok (GNB). Mesir termasuk salah satu pemrakarsa bagi lahirnya organisasi tersebut dan selanjutnya menjalankan peran aktif di dalamnya. Keanggotaan beberapa organisasi tersebut memberikan peluang bagi Mesir untuk mendapat ruang gerak yang memungkinkan baginya untuk berperan aktif dalam berbagai urusan yang melibatkan negara-negara anggotanya. Keterlibatannya secara langsung dalam sengketa Arab-Israel, telah memaksa Mesir banyak berperan sebagai aktor politik penting dalam lingkaran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)³⁷.

Politik dalam dan luar negeri Sadat pada hakekatnya merupakan proses de-Nasserisasi. Ia melakukan liberalisasi terkendali di bidang politik dengan menghapuskan metode negara polisi yang diwariskan oleh Nasser; di bidang pers diadakan aturan-aturan yang longgar dan tokoh pers yang dipenjara Nasser semuanya dibebaskan. Di bidang politik luar negeri Sadat juga melakukan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 151.

pembaharuan terutama sekali dengan meninggalkan politik luar negeri yang revolusioner dan memecah dunia Arab dan menggantikannya dengan politik harmonisasi negara-negara Arab, terlepas dari ideologi dan struktur politik masing-masing³⁸.

Ketakutan Sadat akan kehilangan sebagian wilayahnya, Semenanjung Sinai yang diduduki Israel pada Perang Enam Hari serta penolakan pendirian Negara Israel di tanah Palestina membuat Sadat memutuskan mengajak negara-negara Arab bergabung dalam rencana peperangan dengan Israel. Ajakan Sadat ini awalnya tidak disambut baik oleh negara-negara Arab lain. Melihat posisi Israel yang didukung penuh oleh Amerika dan kepentingan masing-masing negara Arab sulit untuk lepas dari Amerika, maka hanya beberapa negara saja yang bersedia membantu dan mendukung rencana Sadat.

Sadat akhirnya berhasil mengajak Syria dan Yordania untuk bergabung dalam perang. Wilayah strategis Israel yang dikelilingi oleh Mesir, Syria, dan Yordania merupakan salah satu perhitungan Sadat dalam mencapai kemenangan. Selain koordinasi dengan negara-negara tetangga, kekuatan militer Mesir juga harus ditingkatkan. Sadat yang berhasil mengecoh asumsi Israel mengenai keadaan militer Mesir diam-diam mengadakan latihan intensif bagi pasukannya sebagai persiapan perang.

Sadat memerintahkan suatu latihan intensif bagi angkatan perang Mesir sehingga suatu ketika memungkinkan untuk melakukan serangan pendahuluan terhadap posisi Israel. Perubahan diplomatik juga ditingkatkan terus untuk menyiapkan suatu pengertian politik dengan negara-negara Arab sehingga bila perang dengan Israel pecah, pemimpin-pemimpin Arab sudah memiliki kesiapan mental psikologis. Pendirian Sadat sejak semula sesungguhnya sudah jelas, yaitu Mesir bersedia mengakui eksistensi Israel, asalkan Israel mengembalikan seluruh wilayah Arab yang didudukinya pada Perang Enam Hari. Sadat sangat khawatir apabila situasi *no war-no peace* berkelanjutan terus tanpa suatu penyelesaian, secara *de facto* pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Arab mendapat pengakuan internasional. Satu-satunya jalan untuk memecah kebekuan ini Sadat akan melakukan serangan terhadap kedudukan Israel di Semenanjung Sinai untuk

³⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Op.Cit*, hlm. 81.

membuat suatu krisis internasional agar dunia internasional menyadari bahwa ketidakadilan yang menghimpit bangsa Palestina dan perolehan wilayah secara tidak syah oleh Israel masih terus berlangsung. Dengan kata lain Mesir ingin memberi kejutan internasional bahwa bagi Mesir dan dunia Arab pendudukan Israel tidak akan pernah dapat ditolerir.

2.3 Peran Liga Arab

Liga Arab (*Arab League*) yang disebut juga sebagai Liga Negara-Negara Arab merupakan sebuah organisasi pemerintahan internasional tingkat regional. Seperti tampak dalam namanya, organisasi ini beranggotakan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara³⁹.

Awal mula terbentuknya Liga Arab disebabkan oleh dua pengaruh; yang pertama adalah hasrat dari bangsa-bangsa Arab akan persatuan dan kemerdekaan tiap-tiap wilayah Arab, dan pengaruh lainnya lagi ialah disebabkan oleh adanya dorongan dari Inggris. Dorongan yang kuat dari Inggris ini lebih dikarenakan pecahnya Perang Dunia I, yang memaksa Inggris mewarisi fungsi ganda dari imperium yang runtuh kepada negara Arab untuk melindungi serta memelihara rute Inggris ke India, maupun sebagai penyangga terhadap ekspansi Rusia⁴⁰.

Pembentukan Liga Arab diumumkan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri Arab di Iskandaria (Mesir) pada September 1944. Perjanjian formalnya—disebut sebagai pakta Liga Negara-Negara Arab—disepakati pada 22 Maret 1945 antara Mesir, Irak, Transyordania (Yordania), Lebanon, Arab Saudi, Syria, dan Yaman (Utara)⁴¹.

Saat ini Liga Arab beranggotakan dua puluh dua negara termasuk negara-negara pendiri. Negara-negara tersebut adalah Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Syria, Yaman, Libya, Sudan, Maroko, Tunisia, Kuwait, Al-Jazair, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Mauritania, Somalia, Palestina, Djibouti, dan Komoro.

³⁹ Riza Sihbudi. *Menyandera Timur Tengah Ketidak bijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2007, hlm. 110.

⁴⁰ <http://poltimeng.blogspot.com/2009/11/liga-arab.html>, diakses pada 10/12/09, pukul 10.32 WIB

⁴¹ Riza Sihbudi. 2007, *Op.Cit*, hlm. 111.

Liga Arab memiliki enam badan utama. *Pertama*, Dewan Liga, badan tertinggi dari organisasi ini yang beranggotakan para wakil negara anggota, dan prinsip satu negara satu suara. Dewan Liga Arab bersidang dua kali setahun: Maret dan Oktober serta akan mengadakan sidang khusus jika diminta minimal oleh dua negara anggota. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan suara bulat berlaku bagi semua negara anggota, sementara keputusan yang didasarkan pada mayoritas hanya berlaku bagi negara anggota yang menerimanya. Keputusan-keputusan yang menentukan tindakan yang perlu untuk menghadapi agresi diambil berdasarkan suara bulat, dan suara negara agresor tidak perlu diperhatikan. *Kedua*, Komisi-komisi tetap, yang termasuk di dalamnya komisi politik, yang sangat penting, serta komisi budaya, ekonomi, komunikasi, sosial, hukum, penerangan, kesehatan, administrasi, keuangan, dan komisi ahli minyak. *Ketiga*, Sekretariat Jenderal yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, para asisten dan para pejabat-pejabat lainnya. Tugas utama sekretariat Jenderal adalah mempersiapkan dan menyusun anggaran, organisasi, serta memimpin sidang-sidang Dewan Liga Arab. Jabatan Sekjen yang pertama dipegang oleh abdur Rahman Azzam Bey (Pasha) dari Mesir. *Keempat*, Dewan Pertahanan Bersama. *Kelima*, Dewan Sosial dan Ekonomi, Keenam, Organisasi-organisasi Arab yang khusus—seperti Arabsat (*Arab Satellite Communications Organization*), APC (*Arab Potash Company*), AMC (*Arab Maritime Companies*), AMF (*Arab Monetary Fund*), dan AFESD (*Arab Fund for Economic and Sosial Development*)⁴².

Tujuan didirikannya badan-badan ini adalah sebagai kerjasama antar negara anggota Liga Arab di bidang politik, keamanan, ekonomi, komunikasi, budaya, sosial, dan keuangan. Liga Arab adalah organisasi yang menentang berdirinya negara Israel sampai tahun 1989. Bentuk penentangan ini dibuktikan dengan adanya bantuan Liga Arab pada Mesir dalam Perang Yom Kippur berupa Resolusi KTT di Aljir tahun 1973⁴³.

Tujuan Resolusi tersebut adalah untuk membebaskan wilayah Arab yang menjadi daerah penaklukan sejak tahun 1967 tanpa kerugian. Isi Resolusi di bidang militer adalah untuk penyediaan sarana militer oleh negara-negara Arab

⁴² *Ibid*, hlm. 113.

⁴³ Lihat: Lampiran 2.

bagi Mesir dan Syria dalam membantu mereka di Perang Yom Kippur 1973. Memperkuat kapasitas militer mereka untuk memulai kampanye pembebasan dan berdiri cepat dalam menghadapi bantuan dalam jumlah pasokan yang luar biasa dan tidak terbatas yang diterima oleh musuh, serta solidaritas negara-negara Arab untuk memperkuat Mesir dan Syria pada Perang Yom Kippur.

Di bidang ekonomi, Resolusi tersebut dikeluarkan untuk memperkuat hubungan ekonomi negara-negara Arab serta menggunakan minyak sebagai senjata yang mendukung proses embargo minyak bagi para pendukung Israel dalam perang Yom Kippur. Selain itu, membuat sebuah komite penanganan khusus dalam rangka menentukan kenaikan harga minyak, dan persentase pemotongan pasokan minyak.

2.4 Tokoh-Tokoh Mesir yang Berpengaruh dalam Perang Yom Kippur

Kesuksesan Mesir menerobos garis pertahanan Israel tidak lepas dari komando dan gagasan-gagasan para Panglima perangnya. Berikut adalah beberapa tokoh yang berperan penting dalam rencana besar Mesir.

2.4.1 Jenderal Ahmad Ismail Ali

Dalam serangan dadakan, pasukan darat Mesir waktu itu berada di bawah pimpinan Ahmad Ismail Ali, Menteri Peperangan sekaligus Panglima Perang Mesir. Dialah sesungguhnya perencana serbuan. Ismail Ali yang pernah menjadi salah seorang Komandan Divisi Pasukan Darat Mesir pada Perang Enam Hari rupanya sudah belajar banyak. Kekalahan yang dialami Mesir kala itu menjadi cambuk bagi dirinya untuk mencoba taktik yang baru⁴⁴. Faktor keberhasilan rencana serangan Ali membawa dampak yang berarti bagi Mesir. Karena pemikirannya ini, tidak ada yang mengira Israel akan kalah pada awal perang. Ali kemudian menjadi Menteri Peperangan dan sekaligus Panglima Perang Mesir pada 1972. Karena dianggap mampu menaikkan moral dan gengsi militer Mesir, Ali pun diangkat menjadi Panglima Tertinggi Mesir pada November 1973⁴⁵.

Ismail Ali lulus di Akademi Militer Mesir pada 1938 dan langsung membantu pasukan sekutu dalam Perang Dunia II di Front padang pasir Jazirah

⁴⁴ Angkasa, Edisi koleksi *The Yom Kippur War October 1973*. No.XLII 2007, hlm. 23.

⁴⁵ *Ibid.*

Arab. Dia juga terlibat dalam Perang Arab–Israel pada 1948-1949 sebagai Komandan Brigade. Saat Mesir merebut Terusan Suez pada 1956, dia juga ambil bagian penting sebagai salah satu komandan pasukan Mesir. Sebelum Perang Enam Hari meletus, Ali mendapat latihan khusus kemiliteran di Uni Soviet. Akan tetapi, akibat kekalahan Mesir, Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir waktu itu, murka dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada hampir semua petinggi militer. Banyak diantara mereka yang ditarik ke markas dan tidak diberi jabatan. Ismail Ali termasuk salah seorang diantaranya⁴⁶. Pada masa Sadat, banyak komandan-komandan militer yang ditarik kembali untuk memimpin perang Yom Kippur, termasuk Ali. Dia diangkat kembali menjadi Panglima Perang karena dinilai telah mendapat banyak pengalaman perang dan dapat mendukung kemenangan Mesir.

Peran penting Ali dalam Perang Yom Kippur adalah pada rencananya dalam serbuan menembus Benteng Bar Lev di perbatasan Mesir-Israel. Dia berhasil membawa 80.000 pasukannya untuk meruntuhkan Benteng Bar Lev dan menyerang pos-pos penjagaan Israel⁴⁷.

2.4.2 Letnan Jenderal Abdel Gani el Gammasy

Letjen Abdel Gani el Gammasy adalah komandan lapangan tertinggi pasukan Mesir pada Perang Yom Kippur. Ia bawahan langsung dari Jenderal Ahmad Ismail Ali dan merupakan orang kepercayaan Anwar Sadat⁴⁸. Selain menjadi komandan lapangan, Gammasy juga ditunjuk menjadi salah satu anggota tim perunding dengan Israel di akhir peperangan.

Sebelum menyerang Israel, Gammasy mempelajari terlebih dahulu sosial budaya penduduk Israel. Dia juga mempelajari sejarah dalam hal ikhwal kemiliteran Israel. Hal ini semakin terasah ketika dia masuk menjadi anggota tim intelijen militer. Keputusan untuk menyerang Israel pada Hari Yom Kippur adalah buah pikirannya. Dengan memanfaatkan celah dalam sosial budaya ini pula, dia berhasil mengalahkan pasukan Israel pada dua minggu pertama. Pemikirannya sederhana, Yom Kippur adalah Hari Raya terbesar umat Yahudi. Pada hari itu

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

masyarakat Israel biasanya lebih banyak melakukan ibadah daripada hari lain. Pada hari Yom Kippur itu, rakyat Israel dipastikan akan lengah. Secara bersamaan, pada hari Yom Kippur itu bertepatan dengan bulan Ramadhan bagi umat muslim, termasuk pasukan Mesir. Pada saat bulan Ramadhan, dan menjalankan ibadah puasa, semangat umat muslim tinggi untuk membasmi kejahatan. Israel dicitrakan oleh bangsa Arab sebagai penjahat yang harus ditumpas. Strategi ini dianggap jitu bagi para pengamat militer. Gammasy pun dianggap sebagai Jenderal Mesir paling brilian⁴⁹.

Namun demikian, di dalam negeri, Gammasy masih berada di bawah bayang-bayang Jenderal Ismail Ali. Setelah Ismail Ali meninggal pada 1974, barulah Gammasy dapat mencapai posisi tertinggi dalam profesinya sebagai tentara. Dia diangkat menjadi Panglima Tertinggi Mesir, menggantikan Ismail Ali⁵⁰.

2.4.3 Saad el Shazly

Saad el Shazly lahir pada tahun 1922 di desa Shobratana, di jantung delta Sungai Nil. Dia lahir dari keluarga tuan tanah. Shazly bergabung dengan *Royal Academy Militer* Mesir pada tahun 1948 dan ditugaskan berperang melawan Israel di Palestina. Dia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mesir pada 16 Mei 1971 oleh Anwar Sadat dan berakhir pada Desember 1973⁵¹. Keberhasilan Shazly menyelamatkan pasukan Mesir dari serangan Israel pada Perang Enam Hari menjadi bukti bahwa dia termasuk ke dalam Jenderal yang penuh perhitungan. Hal ini pula yang menjadi dasar Anwar Sadat memilihnya menjadi Panglima perang setelah jabatannya diturunkan oleh Nasser pasca Perang Enam Hari.

Shazly berperan dalam rencana serbuan Israel di Perang Yom Kippur bersama Abdel Gani el Gammasy dan Ismail Ali. Keberhasilan serangan kejutan Mesir pada Perang Yom Kippur tidak lepas dari pengaruh Shazly terutama pada pertahanan pasukan Mesir ketika menyerbu Benteng bar Lev. Shazly bersama tentaranya berhasil menjaga pasukan Mesir melalui payung udara yang diarahkan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ <http://www.el-shazly.com/>, diakses pada 20 Desember 2009 pukul 09.00 WIB.

di sekitar Benteng Bar Lev. Pasukan-pasukan ini diturunkan untuk membantu pasukan di bawah komando Ismail Ali dalam menerobos benteng Bar Lev. Pasukan pimpinan Shazly berhasil menahan serangan Israel dan mengacaukan pertahanan mereka. Setelah perang berakhir, jabatan Shazly diturunkan kembali oleh Sadat karena perbedaan pendapat mengenai masalah perdamaian dengan Israel. Shazly kemudian ditugaskan untuk menjadi Duta Besar ke Inggris dan Spanyol⁵².

2.5 Israel pada Perang Yom Kippur

Israel adalah sebuah negara di pinggir timur Laut Tengah. Di seputar negara yang mengaku sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi ini, ada sejumlah negara Arab. Di sebelah utara ada Lebanon, di timur ada Yordania dan Syria, di barat daya ada Mesir⁵³.

Negara Israel resmi berdiri sejak proklamasi kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Dengan kemerdekaan ini, cita-cita orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk mendirikan negara sendiri tercapai. Mereka telah melaksanakan amanat yang disampaikan Theodor Hertzl dalam tulisannya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) sejak 1896⁵⁴. Presiden (dalam bahasa Ibrani *Nasi*) dipilih oleh *Knesset*. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan boleh menduduki dua kali masa jabatan. Walaupun kekuasaan presiden terbatas, tetapi kedudukan ini mempunyai prestise tinggi. Presiden dapat menunjuk *Knesset*⁵⁵ untuk membuat pemerintah baru menyusul adanya pemilu atau ia dapat membubarkan pemerintah yang sedang berjalan⁵⁶.

Selain itu, tugas lain Presiden adalah menerima surat kepercayaan Duta Besar asing di Israel; menandatangani perjanjian dan undang-undang yang telah disetujui oleh *Knesset*; memberikan rekomendasi untuk pengangkatan Gubernur Bank Israel, dan misi diplomatik Israel di luar negeri, dan memberikan grasi atau

⁵² Angkasa, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁵³ Riza Sihbudi, dkk. 1995, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Knesset* adalah Badan legislatif pada pemerintahan Israel. Anggotanya dipilih empat tahun sekali dan bekerja dalam rapat pleno dan komite. Lihat: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/knesset.html>. diakses pada 09/12/09, pukul 08.30 WIB.

⁵⁶ Riza Sihbudi, dkk. 1995. *Op.Cit*. hlm. 108.

pengurangan hukum narapidana atas usulan Menteri Kehakiman. Dari urutan presiden Israel, Zalman Shazar adalah Presiden ketiga. Dia lahir di Rusia pada 1889. Dia seorang aktivis partai *Ahdut Haadova*, kemudian *Mapai*, dan pernah menduduki anggota sekretariat komite eksekutif *Histadrut*. Pada umur 74 tahun, 1963, dia terpilih sebagai presiden dan jabatan ini didudukinya sampai meninggal tahun 1973⁵⁷. Presiden keempat adalah Ephram Katzir yang lahir di Ukraina, 1916. Pada umur enam tahun, dia bersama orang tuanya bermigrasi ke Palestina. Dia seorang akademisi, bukan politikus. Dan menjabat Presiden dari tahun 1973 sampai 1978⁵⁸. Katzir menggantikan posisi Shazar setelah kematiannya.

Letak Israel di antara negara-negara Arab memudahkan negara sekitarnya memantau gerakan-gerakan militernya. Hal ini dimanfaatkan Mesir untuk melakukan serangan serbuan terhadap Israel pada tahun 1973. Israel sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Syria dan Yordania sempat terhenti dalam penyerangan tersebut dan hampir dapat terkalahkan oleh pasukan-pasukan militer milik Mesir, Syria, dan Yordania. Pengepungan serangan yang dilancarkan terhadap Israel tidak pernah terpikirkan sebelumnya karena Israel menganggap perbatasan yang mengelilingi daerahnya tidak mudah ditembus negara-negara tetangga. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Mesir dan Syria untuk membuktikan pada Israel bahwa pertahanannya tidak sekuat yang dibanggakannya.

2.6 Tokoh-tokoh Penting Israel dalam Perang Yom Kippur

Penyesalan Israel dengan bobolnya benteng yang menjadi pembatas dengan Mesir dibayar dengan turunnya beberapa petinggi Israel yang berpengaruh dalam masalah ini. Tokoh-tokoh tersebutlah yang menjadi kunci pertahanan Israel dan agresinya terhadap Mesir pada minggu kedua.

2.6.1 Golda Meir

Golda Meir adalah Perdana Menteri keempat Israel dengan masa jabatan lima tahun (1969-1974). Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel pada 1956-1966. Dia lahir di Kiev, Ukraina pada 1898. Ketika dia berusia delapan tahun, keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat. Dia dibesarkan di

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 107.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 108.

Milwaukee, Wisconsin, dan bergabung dengan sebuah gerakan pemuda Zionis, kemudian menikah dengan Morris Myerson. Pada tahun 1921, Meir bermigrasi ke Palestina, dan menetap di Kibbutz Merhavia⁵⁹. Meir meninggal pada 8 Desember 1978 di usianya yang kedelapan puluh dan dikuburkan di Mount Herzl, Jerusalem empat hari kemudian⁶⁰. Ironisnya, Meir meninggal pada hari dimana Menachem Begin, penggantinya, dan Anwar Sadat, Presiden Mesir, menerima hadiah Nobel Perdamaian untuk menyampaikan perdamaian Israel-Mesir⁶¹.

Perdana Menteri wanita itu dinodai oleh kegagalan untuk mengantisipasi Perang Yom Kippur ketika 2500 tentara Israel kehilangan nyawa mereka. Meir, sebagai Perdana Menteri waktu itu mengabaikan berita penyadapan Mesir oleh Agen Intelijen Israel, Mossad mengenai rencana penyerangan Mesir ke Israel di bulan Oktober 1973. Laporan tersebut dianggap sebagai informasi yang tidak akurat. Ketidakpercayaan Meir terhadap laporan Mossad karena Meir menilai Mesir masih trauma dengan kealahannya pada Perang Enam Hari. Selain itu, militer Mesir tidak akan sanggup mengalahkan militer Israel yang selalu menang pada peperangan melawan bangsa Arab⁶². Dia dikritik secara luas karena ketidaksiapan Israel dalam menghadapi serangan Perang Yom Kippur. Meskipun pasukan Mesir dan Syria dikalahkan secara telak, 2.500 serdadu Israel tewas dan 3.000 lainnya terluka⁶³.

Pemerintahan Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Golda Meir menuai protes. Protes dipimpin oleh Moti Ashkenazi, seorang Komandan Militer Israel. Mereka menuntut Ketua Mahkamah Agung Shimon Agranat memimpin sebuah penyelidikan mengapa mereka sampai kecolongan sehingga dengan mudah digempur Mesir dan Syria. Komisi itu diberi nama Komisi Agranat. Puncak dari tuntutan ini, pada 11 April 1974 Perdana Menteri Golda Meir

⁵⁹ http://www.zionism-israel.com/bio/golda_meir_biography.htm, diakses pada 10/12/09, pukul 10.58 WIB.

⁶⁰ Angkasa, *Op.Cit.*, hlm. 28.

⁶¹ <http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/Golda+Meir.htm>, diakses pada 20/12/09, pukul 09.03 WIB.

⁶² <http://www.notablebiographies.com/Ma-Mo/Meir-Golda.html>, diakses pada 10/12/09, pukul 11.31 WIB.

⁶³ Angkasa, *Op.Cit.*

memutuskan mundur. Padahal dia dan Partai Buruh menang dalam pemilihan. Dia kemudian digantikan oleh Yitzak Rabin⁶⁴.

2.6.2 Moshe Dayan

Moshe Dayan lahir pada 20 Mei 1915, di Kibbutz Deganya Alef, dekat Danau Kinneret (Laut Galilea). Kibbutz ini didirikan pada tahun 1910 dan disebut *em hakvutzot* - ibukota dari pemukiman kolektif. Ketika usianya 14 tahun, Dayan bergabung dengan Haganah, sebuah organisasi bawah tanah yang membela pemukiman Yahudi dari serangan Arab. Dalam Haganah, Dayan belajar perang gerilya dari Kapten Inggris, Charles Orde Wingate, dia adalah pemimpin patroli malam yang diselenggarakan untuk melawan pemberontak Arab. Selama kerusuhan pada 1936-1939, dia menjabat sebagai Kepolisian Khusus di Lembah Yizreel dan Galilea. Ketika Inggris melarang Haganah di tahun 1939, Dayan ditangkap dan dipenjarakan selama dua tahun⁶⁵.

Politik Israel Menderita kekalahan besar karena didudukinya Dataran Tinggi Golan dan Sinai oleh Syria dan Mesir pada Perang Yom Kippur. Kasus ini terbilang serius karena runtuhnya pertahanan utara yang membalikkan keadaan Israel hanya dalam waktu empat puluh delapan jam. Melihat situasi seperti ini, Perdana Menteri Golda Meir memerintahkan Moshe Dayan sebagai Panglima Perang Israel waktu itu untuk menggunakan senjata nuklir milik Israel. Namun permintaan ini tidak dilaksanakan Dayan dengan perhitungan akan memancing reaksi dunia dan mengakibatkan semakin terpojoknya keadaan Israel⁶⁶.

Pada Perang Yom Kippur, Dayan sudah membaca serangan pasukan Mesir meskipun pada awalnya Israel berhasil dikejutkan. Situasi tentara Israel yang terpojokkan oleh pasukan Mesir dan Syria karena didudukinya daerah Sinai dan Golan membuat militer Israel kewalahan. Serangan Mesir dan Syria menerobos pertahanan Israel dengan rudal-rudal dan tank-tank buatan Soviet. Namun, berkat keahlian Dayan, Israel dapat memukul mundur pasukan Mesir dan Syria hingga melewati perbatasan Israel. Padahal banyak pihak meyakini Mesir akan menang

⁶⁴ Angkasa, *Ibid.* hlm. 28.

⁶⁵ <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Dayan.html>, diakses pada 09/12/09, pukul 08.30 WIB.

⁶⁶ Martin Windrow and Francais K. Masa. *The World's Greatest Military Leaders*, England: Grange Books PLC, 2000, hlm. 64.

setelah kesuksesan di awal serangan. Saat Menachem Begin mengambil alih kendali di Israel pada 1977, Begin menunjuk Dayan menjadi Menteri Luar Negeri. Namun Dayan berhenti dari jabatannya pada Oktober 1979⁶⁷.

2.6.3 David Elazar

Letnan Jenderal David Elazar, lebih dikenal dengan nama Dado. Dado selalu memakai baret hitam yang menjadi ciri khasnya. Dia lahir di Sarajevo, 1925. Karir kemiliterannya mulai menanjak sejak perang Arab-Israel pertama, tahun 1948. Dia berhasil mengambil alih Dataran Tinggi Golan pada Perang Enam Hari. Keberhasilan usahanya ini membuatnya naik jabatan menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel⁶⁸.

Beberapa saat sebelum Perang Yom Kippur pecah, Kabinet Israel memerintahkan untuk memobilisasi sebagian pasukannya untuk mengantisipasi pergerakan pasukan Mesir di Sinai. Namun ternyata dia tidak hanya memobilisasi sebagian pasukannya, tetapi seluruh pasukan dia kerahkan untuk pertahanan. Sikap yang melanggar perintah ini justru menyelamatkan Israel karena pasukan Mesir tersebut bukan saja hanya sebatas latihan militer seperti dugaan Kabinet Israel, tetapi hal tersebut adalah awal dari serangan Mesir. Namun, setelah Perang Yom Kippur berakhir, Dado diturunkan dari jabatannya oleh Komisi Agrarat karena tetap dinilai lalai dalam membaca serangan Mesir⁶⁹.

⁶⁷ Angkasa, *Op.Cit.* hlm. 28.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 26.

⁶⁹ *Ibid*.

BAB 3

STRATEGI MESIR DALAM PERANG YOM KIPPUR

3.1 Perang Yom Kippur 1973

Rencana Sadat mewujudkan cita-cita Nasser dalam membalaskan kekalahan Mesir pada Perang Enam Hari akhirnya terwujud. Setelah melalui rencana yang matang, Mesir melancarkan serangan terhadap Israel tepat pada saat hari suci umat Yahudi. Yom Kippur adalah hari suci umat Yahudi, hari libur besar masyarakat Israel. Definisi Yom Kippur diambil dari bahasa Ibrani yang berarti hari pengampunan dosa (dalam bahasa Arab *Yaumul Ghufro:n*). Perayaannya dilaksanakan pada tanggal sepuluh bulan Tishri dalam kalender Yahudi. Pada hari suci ini, kegiatan masyarakat Israel diliburkan dan umat Yahudi pergi ke *Synagoge*⁷⁰ untuk beribadah. Namun di tengah keadaan tenang ini, muncullah suatu kekuatan yang tak diduga, yaitu serangan gabungan dari Mesir dan Syria yang membuyarkan situasi sakral umat Yahudi⁷¹.

Pada tahun 1973, Israel mendapatkan serangan kejutan dari Mesir dan Syria untuk merebut kembali Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Perang antara Israel dengan Mesir dan Syria ini disebut sebagai perang Yom Kippur karena terjadi tepat pada hari suci menurut kalender Yahudi. Inilah kekalahan pertama Israel dalam perang-perangnya. Dari situ kita dapat melihat bahwa pada akhirnya, permasalahan perebutan wilayah ini tidak hanya dengan bangsa Palestina saja tetapi juga dengan negara-negara tetangga lainnya, sehingga menimbulkan perhatian khusus dari dunia internasional⁷².

Tujuan diadakannya perang ini adalah untuk merebut kembali sebagian wilayah Mesir dan Syria yang diambil Israel pada perang Enam Hari. Mesir berusaha merebut Semenanjung Sinai dan Syria menginginkan Dataran Tinggi Golan. Perang ini berlangsung sejak tanggal 6–26 Oktober 1973. Perang yang

⁷⁰ *Synagogue* adalah nama tempat peribadatan umat Yahudi, atau bisa juga disebut sebagai gereja Yahudi. Lihat: R. Garaudi: *Kasus Israel Studi tentang Zionisme Politik*. Terj. Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, hlm. 8.

⁷¹ Edition Assouline. *Les symbols du Judaisme*. New York: St. Martin's Press, 1997, hlm. 70.

⁷² <http://dewitri.wordpress.com/2009/01/03/resolusi-konflik-arab-israel>, diakses pada 10/12/09, pukul 13.03 WIB.

berlangsung selama dua puluh hari ini memiliki beberapa nama dari masing-masing negara yang berperang⁷³.

Mesir menamakan perang itu sebagai Perang Ramadhan karena terjadi pada bulan Ramadhan. Operasi tersebut nampaknya memang menanamkan dimensi agama dalam perang itu dengan menamakan pasukan Mesir sebagai Operasi Shalahuddin⁷⁴. Untuk mengingatkan tentara Mesir pada pemimpin Perang bangsa Arab bernama Shalahuddin yang menghancurkan tentara Eropa pada Perang Salib⁷⁵.

Syria, menamakan Perang ini dengan nama Perang Badr karena terjadi pada saat bulan purnama. Walaupun terdapat tiga nama berbeda di tiga negara yang berbeda pula, perang ini lebih dikenal dengan sebutan Perang Yom Kippur karena perang ini adalah perang yang begitu berarti baik dari pihak Arab maupun Israel. Yom kippur tahun 1973 merupakan suatu peristiwa yang membawa dampak panjang dari pihak-pihak yang terkait⁷⁶.

Dalam minggu pertama terjadinya perang, kondisi Israel terlihat memburuk hari demi hari. Serangan balasan yang mereka lancarkan gagal. Pihak Syria dan Mesir sepertinya bertempur dengan penuh semangat perjuangan. IDF (*Israeli Defence Force*, Tentara Pertahanan Israel) menderita kekalahan besar⁷⁷. Pasukan-pasukan artileri dan peluru-peluru kendali dari darat ke udara dijadikan payung oleh pasukan Mesir yang terus bergerak maju dan satu langkah brilian tentara Mesir dilakukan dengan berhasil, yaitu dinding-dinding Israel dibanjiri dengan air dari Terusan Suez dan Benteng Bar Lev ikut hancur secara cepat.

Persiapan Mesir dalam Perang Yom Kippur dapat dikatakan sudah cukup matang dalam rencana penyerangan awal. Rencana peperangan yang didukung oleh beberapa pihak membuat serangan awal Mesir menuai kesuksesan. Dua hari sebelum perang, Mesir mempersiapkan penyerangan jarak dekat secara diam-diam. Rencana ini sebenarnya sudah tercium oleh Mossad, Badan Intelijen Israel.

⁷³ Angkasa, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁷⁴ Shalahuddin atau Salahudin Ayyubi atau Saladin atau Salah ad-din adalah tokoh Jenderal sekaligus pejuang muslim Mesir pada masa Perang Salib, Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Salahuddin_Ayyubi, diakses pada 16 Desember 2009, pukul 13.07 WIB.

⁷⁵ Angkasa. *Op.Cit*, hlm. 85.

⁷⁶ *Ibid*. hlm. 24.

⁷⁷ Ron david. *Arab Israel untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2007, hlm. 130.

Sayangnya himbauan Mossad tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh para petinggi Israel. Mereka terkecoh oleh pernyataan media massa bahwa pasukan Mesir tidak akan sanggup mengalahkan Israel setelah Perang Enam Hari. Pada 4 Oktober 1973, media massa Mesir telah memobilisasi 20.000 pasukan cadangannya. Untuk mengecoh Israel, pasukan khusus Mesir diperintahkan menyebrangi Suez tanpa helm, senjata, dan pakaian tempur. Mereka menyeberang sambil memancing dan makan jeruk⁷⁸.

Perang yang dimulai pada 6 Oktober ini mengejutkan warga Israel yang sedang merayakan ibadahnya. Ketidaksiapan militer dan persenjataan Israel membuat keyakinan pasukan Arab kuat akan datangnya kemenangan. Memasuki hari keempat peperangan, Israel mulai kehabisan cadangan persenjataan. Hal ini diantisipasi dengan meminta bantuan ke Amerika atas segala persenjataan yang mendukung perang. Amerika mengabulkan permohonan Israel dan mengirimkan persenjataan yang dapat menandingi rudal-rudal Soviet⁷⁹.

Sehari kemudian, tepatnya pada 10 Oktober 1973 Washington mengizinkan diadakannya jembatan udara untuk suplai militer ke Israel setelah Uni Soviet mengirimkan suplai persenjataan tambahan ke Mesir. Israel dengan sukses menyerang pasukan Mesir yang sudah bergeser ke luar jangkauan perlindungan payung rudal permukaan ke udara. Israel sudah menguasai kembali sebagian besar wilayah di bagian selatan Dataran Tinggi Golan. Pesawat-pesawat Israel berhasil dirontokkan oleh Syria hingga melewati jalur pipa minyak yang membentang dari kawasan Dataran Tinggi Golan, Syria, dan Yordania. Setelah melewati pipa-pipa minyak tersebut, esok harinya pasukan infanteri Syria, Syria 5th Infanteri Division terus bergerak maju dan berada hanya sepuluh kilometer sebelah tenggara Juhader⁸⁰.

Pada 11 Oktober 1973, Israel menyerang Syria dari posisinya di Dataran Tinggi Golan. Duta Besar Uni Soviet untuk Amerika Serikat, Anatoly Dobrynin, mengatakan pada Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger bahwa pasukan udara Soviet sudah bersiaga untuk mempertahankan Damaskus. Kissinger memperingatkan Dobrynin bahwa jika Soviet mengirimkan pasukan ke Timur

⁷⁸ Angkasa, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 16.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

Tengah, Amerika Serikat juga melakukan hal serupa. Pada 12-13 Oktober 1973, Amerika mengirimkan persenjataan tambahan ke Israel. Tiga hari kemudian, tepatnya 16 Oktober 1973 Pasukan Israel pertama menyeberangi Terusan Suez. Presiden Mesir Anwar Sadat meminta Uni Soviet untuk melibatkan PBB dan mengupayakan gencatan senjata⁸¹.

Dua minggu setelah Mesir dan Syria berhasil mengalahkan Israel, menghancurkan tank-tank Israel di Dataran Tinggi Golan, Israel bahkan berhasil menggempur Syria sampai ke Damaskus⁸².

“As a casualties mounted and both sides suffered staggering losses, the superpowers entered the arena. The Soviet Union began to resupply the Arab States with ammunition and light weapons. When the United States decided to do the same for Israel, The Soviet Union escalated its supply operations to tanks and planes. This too was matched by The United States”⁸³.

“Sebagai sebab-akibat dari kedua belah pihak yang menderita kerugian besar, arena dimasuki oleh negara-negara adikuasa. Uni Soviet mulai memasok negara-negara Arab dengan amunisi dan persenjataan-persenjataan ringan. Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan hal yang sama terhadap Israel, Uni Soviet pun meningkatkan pasokan pengoperasian tank-tank dan pesawat-pesawat. Hal tersebut juga diimbangi oleh pihak Amerika Serikat”.

Pada saat pertempuran memuncak, Amerika Serikat dengan cepat memperkuat persenjaataan Israel dengan melakukan *airlift operation* (operasi pengangkutan udara) ke Israel. Di pihak lain Uni Soviet juga membantu persenjataa Mesir dari udara. Ada tiga hal penting mengenai suplai persenjataan ke Israel dalam hubungan ini. *Pertama*, persediaan senjata vital Amerika di berbagai pangkalan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dikirim langsung ke Israel; hal ini dikeluhkan oleh banyak tokoh-tokoh militer Amerika Serikat sendiri. *Kedua*, dalam jumlah yang besar, peralatan langsung diterbangkan dari Amerika dengan pesawat transpor ke Israel dan seluruh anggota NATO menolak negara-negaranya disinggahi oleh pesawat transpor Amerika itu, kecuali Portugal; negara yang waktu itu berada di bawah diktator Marcello Caentano memperbolehkan pangkalan udaranya di Azores untuk transit pesawat-pesawat

⁸¹ *Ibid*, hlm.21.

⁸² John G. Stoessinger. *Why Nation Go to War*. New York St. Martin's Press: 1993, hlm. 162.

⁸³ *Ibid*.

Amerika. *Ketiga*, pesawat-pesawat Amerika membawa perbekalan dan peralatan militer tidak saja langsung ke Israel, tetapi langsung ke medan perang di Semenanjung Sinai dengan demikian tidak aneh bila tindakan Amerika Serikat ini dianggap sebagai tindakan permusuhan oleh negara-negara Arab⁸⁴.

Menurut majalah *Angkasa* No. XLII 2007, Pada tanggal 22 Oktober 1973 Israel mengambil alih pasukan Syria di Gunung Hermon. Kemudian Dewan Keamanan PBB menerapkan Resolusi 338 yang menyerukan gencatan senjata segera. PBB juga memerintahkan kepada negara yang bersengketa untuk menerapkan kembali Resolusi 242 yang menyerukan pertukaran wilayah untuk perdamaian, dan negosiasi antara pihak-pihak terkait. Tujuannya untuk mencapai perdamaian adil dan kekal⁸⁵.

Hal yang sama pun terjadi pada pihak Mesir. Strategi perang yang sudah terencana matang di awal ternyata tidak semulus pada serangan minggu pertama. Nampaknya Mesir tidak pernah memperhitungkan bahwa pertahanannya dapat diterobos Israel sehingga hubungan dengan *Egyptian Second Army* yang berhadapan dengan kota Ismailia dapat dipisahkan dari *Egyptian Third Army* yang berhadapan dengan Suez. Pertempuran tank paling berat adalah ketika pasukan tank Israel menghadapi pasukan tank Mesir dari utara dan selatan⁸⁶. Dengan dikeluarkannya Resolusi PBB No.338 menandakan akhir dari peperangan. Pada 24 Oktober 1973 mulai diberlakukan gencatan senjata dan perang benar-benar berhenti pada tanggal 26 Oktober 1973.

Korban yang jatuh dari pihak Mesir dan Syria diperkirakan lebih besar ketimbang korban yang jatuh dari pihak Israel. Sebuah lembaga survei milik Amerika bernama Pentagon memperkirakan jumlah korban yang jatuh dari peperangan ini. Berikut adalah tabelnya⁸⁷

Negara	Tahun	Combat Forces	Penduduk	Kerugian
Mesir	1973	400000	43000000	5000
Irak	1973	400000	11000000	5000
Israel	1973	200000	4200000	4000

⁸⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Op.Cit*, hlm. 87-88.

⁸⁵ *Angkasa*, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁸⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Op.Cit*.

⁸⁷ <http://www.onwar.com/aced/data/yankee/yomkippur1973.htm> diakses pada 10/12/09, pukul 09.07 WIB (Jumlah angka kerugian dalam hitungan juta dolar).

Yordania	1973	60000	1750000	1000
Syria	1973	350000	9000000	8000

Dari tabel diatas terlihat bahwa Mesir adalah negara dengan jumlah tentara dan penduduk, terbesar dibanding empat negara lain. Penduduk Mesir dengan jumlah empat puluh tiga juta orang dikurangi empat ratus ribu orang sebagai tentara yang maju ke medan pertempuran dan menghasilkan jumlah korban terbesar kedua sebanyak lima ribu orang. Negara kedua yang menderita kerugian adalah Irak. Walaupun bukan sebagai negara utama dalam peperangan, suplai bantuan persenjataan yang dikeluarkan Irak hampir sama dengan Mesir sebagai negara utama. Urutan ketiga ditempati oleh Syria dengan jumlah korban delapan ribu orang. Jumlah korban dari pihak Syria adalah jumlah terbesar jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan kerugian. Israel sebagai negara keempat dengan jumlah korban terbanyak. Penduduk Israel yang lebih sedikit dibanding negara-negara lain terhitung besar pula dalam kerugiannya karena dengan jumlah penduduk dua ratus ribu orang dikurangi kerugian empat ribu orang adalah jumlah yang besar. Namun tidak sebesar korban yang ada pada pihak Mesir. Yordania adalah negara terakhir dengan jumlah kerugian dan penduduk terkecil dalam perang Yom Kippur. Kerugian ini tidak terpaku pada korban jiwa yang meninggal saja, namun kerugian yang dihitung dengan total meninggal, luka-luka, dan kerusakan artileri.

Menurut pengakuan Israel sendiri serdadunya yang mati berjumlah 1.854 orang dan sebanyak itu pula yang luka-luka. Menurut perkiraan Pentagon, lembaga survey Amerika Serikat, kemungkinan tentara Mesir dan Syria yang tewas sekitar lima kali lebih besar. Menurut catatan Pentagon, ada sekitar 100 pesawat tempur Israel yang jatuh, sekitar 500 tank, dan 300 kendaraan lapis baja Israel hancur. Pentagon memperkirakan seandainya Amerika tidak lekas memberikan re-suplai terhadap Israel, kemungkinan besar Israel kalah dalam Perang Yom Kippur itu. Di pihak lain, pesawat tempur, dan tank Syria dan Mesir yang hancur pada perang itu ditaksir dua kali lebih besar dari apa yang dikorbankan oleh Israel. Hanya saja jumlah penduduk yang jauh lebih besar yang

dimiliki Mesir (40 juta penduduk), secara proporsional korban manusia yang tewas di pihak Israel menjadi lebih besar dan lebih terasa⁸⁸.

Biaya yang mahal harus ditanggung Mesir sebagai pemrakarsa perang, dengan jumlah korban dan kerugian yang paling besar di antara negara-negara yang terlibat perang dan dampak ekonomi yang panjang di dalam negeri. Namun, di balik itu terdapat suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Israel, sebagai negara kecil yang kerap kali menang perang melawan negara-negara Arab ternyata dapat dibuat tak berdaya jika tidak mendapat bantuan dari Amerika

Pada 16 Oktober Presiden Sadat menghimbau suatu gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya pada 1967. Segera setelah itu Menteri Luar Negeri Amerika, Henry Kissinger terbang ke Moskow menemui Sekjen Partai Komunis, Leonid Breznev untuk membicarakan pentingnya kedua negara besar (Amerika dan Uni Soviet) mendukung gencatan senjata. Dewan keamanan PBB mendeklarasikan *cease-fire* (gencatan senjata) dan mengeluarkan Resolusi 338⁸⁹.

3.2 Rangkaian Strategi Mesir

Strategi adalah hal utama dalam berperang. Suatu kemenangan akan diraih bila strategi yang digunakan tepat. Strategi menurut Clausewitz adalah suatu tujuan dari peperangan. Strategi perang harus berlandaskan faktor moral dan strategi fisik⁹⁰. Mengacu dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perang tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan tanpa adanya strategi.

Seperti halnya perang-perang lain, Perang Yom Kippur pun menggunakan suatu strategi untuk mendapatkan kemenangan atas negara Arab. Anwar Sadat sebagai Pemimpin Mesir masa itu merencanakan strategi dengan matang menjelang perang. Ia mempelajari faktor-faktor kekalahan Mesir pada Perang Enam Hari dan menjadikannya pelajaran pada Perang Yom Kippur. Sadat menyadari bahwa kekuatan militer Israel tidak mungkin dikalahkan oleh Mesir. Walaupun luas negara Israel lebih kecil daripada luas Mesir dan negara-negara

⁸⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁸⁹Riza Sihbudi. 2007, hlm. 34-35.

⁹⁰ Clausewitz. *On War*. Amerika: Princeton University Press: 1976, hlm. 207.

Arab lainnya, tetapi faktor paling penting adalah adanya bantuan Amerika ke Israel. Teknologi militer Amerika tidak sebanding dengan teknologi militer negara-negara Arab. Adapun Uni Soviet sebagai pihak penyokong Mesir dan Syria, namun jumlah bantuan yang diberikan Soviet kepada Arab tidak akan sama dengan jumlah bantuan Amerika kepada Israel.

Para ahli strategi Mesir menyadari dua kekuatan utama Israel: Angkatan Udara yang superior dengan sistem peringatan dini yang sangat efektif seperti terbukti pada Perang Enam Hari dan Korps Angkatan Darat yang dapat bergerak sangat efisien dan cukup canggih. Sebaliknya mereka memahami kelemahan-kelemahan Israel yang meliputi beberapa hal: *pertama*, perbatasan Israel yang panjang dan berhadap-hadapan dengan empat negara Arab (Lebanon, Syria, Jordan, dan Mesir), sehingga garis komunikasinya juga panjang. *Kedua*, penduduk Israel sedikit, jadi sangat peka jika kehilangan tentaranya dalam jumlah yang relatif tidak banyak, dan Israel tidak menyukai perang yang berlarut-larut karena akan menghancurkan ekonominya. *Ketiga*, Israel dihinggapi kepercayaan pada diri sendiri yang berlebihan akibat kesuksesan-kesuksesan militer di masa lalu⁹¹.

Mesir menggunakan tiga jenis strategi dalam serangannya terhadap Israel. Diantaranya adalah strategi militer. Selain strategi militer, Mesir juga melakukan strategi lain di bidang komunikasi dan perekonomian. Strategi militer digunakan pada saat penyerbuan langsung ke wilayah Israel, sedangkan strategi dalam bidang komunikasi adalah upaya mesir untuk mempengaruhi Israel dalam kondisi psikologisnya, terakhir strategi dalam bidang ekonomi digunakan Mesir sebagai tahap akhir bila strategi militer gagal.

3.2.1 Keterlibatan Media Massa

Pers adalah kekuatan keempat di Mesir setelah lembaga pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁹². Dimasukkannya Pers menjadi kekuatan keempat adalah berdasarkan Perubahan Konstitusi Tahun 1980⁹³ dan UU No. 148 Tahun 1981⁹⁴. Pers adalah kekuatan rakyat yang independen. Kebebasan pers

⁹¹Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Op.Cit*, hlm. 84.

⁹² Lihat: Riza sihbudi dkk. 1993, hlm. 90.

⁹³ Lihat: lampiran No. 4.

⁹⁴ Lihat: Lampiran No. 3.

dijamin oleh Undang-Undang dan sensor terhadap pers ditiadakan⁹⁵. Wartawan bebas melakukan kegiatannya asalkan tidak melanggar hukum.

Hal tersebut sesuai dengan hukum Konstitusi Pers Artikel 208 yang menyatakan bahwa pers dijamin dan sensor pers dilarang. Selain itu, dilarang juga mengancam, menekan, atau menyita surat kabar melalui tindakan-tindakan administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan didefinisikan oleh hukum⁹⁶. Kebebasan pers Mesir tetap tunduk terhadap pemerintahan. Hal ini dimanfaatkan oleh Presiden Anwar Sadat untuk mengecoh Israel dan Amerika mengenai keadaan kekuatan militer Mesir. Pers Mesir hanya memberitakan keadaan Mesir setelah Perang Enam Hari. Pada Perang Enam Hari, Mesir menderita kerugian dan keterpurukan. Pemecatan para Jenderal Mesir oleh Nasser pada Perang Enam Hari diberitakan sedangkan pengangkatan kembali para Jenderal tersebut oleh Sadat untuk melatih miter Mesir tidak disebarluaskan.

Ketentuan ini juga mengacu pada artikel 210 yang menyatakan bahwa Jurnalis memiliki hak untuk memperoleh berita dan informasi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh hukum⁹⁷. Pada kasus ini, kebebasan pers bukan untuk dibatasi, tetapi diarahkan untuk menginformasikan hal-hal ataupun berita tentang Mesir khususnya pasca Perang Enam Hari. Berita mengenai persiapan perang sesudah itu pun dirahasiakan. Pers hanya memublikasikan kegiatan-kegiatan latihan rutin militer Mesir⁹⁸.

Pembelaan negara juga dapat dilakukan melalui media massa. Mengacu pada Artikel 207, pers harus menjalankan misi yang benar, bebas, dan mandiri dalam pelayanan masyarakat melalui ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Kerahasiaan persiapan Mesir untuk melancarkan Perang Yom Kippur adalah bentuk bela negara. Israel ataupun Amerika tidak dapat menuntut Dewan Pers Mesir terhadap kurangnya pemberitaan ini karena terjaminnya kebebasan pers Mesir oleh pemerintah.

Untuk memudahkan pengaturan kehidupan pers, maka dibentuk Dewan Tinggi Pers (*Al-Majlis al-A'la lil-Shahafat*). Dewan mempunyai tanggung jawab

⁹⁵Riza Sihbudi, dkk. 1983, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁹⁶ Lihat Lampiran no. 4.

⁹⁷ Riza Sihbudi, dkk. 1983, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁹⁸ *Ibid.*

untuk mengemukakan pendapat dalam Rancangan Undang-Undang yang mengatur masalah pers, menjamin kemajuan dan pertumbuhan pers, melindungi kegiatan pers dan hak-hak wartawan, menetapkan kode etik pers, menanggung upah minimum yang pantas bagi wartawan dan para pekerja pers, dan menerbitkan izin bagi wartawan yang ingin bekerja untuk penerbitan non-Mesir atau penerbitan asing, agen berita, atau organisasi media yang lainnya. Baik di dalam Mesir maupun di luar negeri⁹⁹.

Dengan adanya kerjasama antara media massa dan pemerintah yang terjalin dengan baik, maka akan menjadi imbas yang baik pula terhadap negara. Dampak positif dari kerjasama ini adalah berhasilnya serangan kejutan Mesir terhadap Israel.

3.2.2 Penyerangan Kejutan

Belajar dari kekalahan perang dengan Israel sebelumnya, tidak mungkin Mesir menyerang Israel dengan cara terbuka. Teknologi Mesir yang belum sebanding dengan Israel tidak dapat dipaksakan dalam peperangan umumnya. Namun, tidak adanya tindak lanjut dari PBB mengenai wilayah Sinai dan Dataran Tinggi Golan, membuat Mesir harus melakukan sesuatu untuk menarik perhatian dunia internasional mengenai status wilayahnya. Mesir mengajak Syria yang juga bernasib sama mengenai status wilayah yang diambil alih Israel pada Perang Enam Hari. Strategi militer yang telah disusun Mesir dikoordinasikan dengan baik oleh Angkatan Bersenjataanya.

Selain koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Mesir, Sadat juga meminta pendapat Raja Faisal¹⁰⁰ mengenai rencana serangan. Raja faisal berkata:

“Ada satu permintaan saya. Bila saudara hendak melancarkan perang, janganlah terus diikuti dengan gencatan senjata setelah beberapa jam atau hari saja. Perpanjanglah peperangan itu karena perang yang panjang, kita bangsa Arab akan dapat mengambil kesatuan sikap”¹⁰¹.

¹⁰⁰Faisal bin 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud adalah Raja Arab Saudi yang menjabat mulai tahun 1964 hingga tahun 1975 (Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Faisal_dari_Arab_Saudi, diakses pada 20/12/09, pukul 16.40 WIB), dia mendukung serangan Mesir-Israel dalam Perang Yom Kippur 1973.

¹⁰¹Anwar Sadat, *Kemarau Kemarahan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1987, hlm. 86.

Perang yang terjadi antara pasukan Arab dengan Israel bukanlah dalam jumlah pasukan yang sama. Israel bermodalkan persenjataan canggih dari Amerika sedangkan Arab selain persenjataan, didukung pasukan dalam jumlah besar. Bila Israel melaksanakan perang dalam waktu lama, maka keadaan dalam negeri menjadi tidak stabil. Selain perekonomian yang kacau, jumlah penduduk pun menjadi semakin berkurang.

Para ahli strategi Mesir merancang suatu langkah untuk meminimalisasi kekuatan Israel dan mengambil keuntungan secara maksimal atas kelemahan-kelemahan Israel. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Syria harus dilibatkan dalam operasi militer melawan Israel agar Israel membuka dua front sekaligus, di utara dengan Syria dan di selatan dengan Mesir. Perang di front utara sangat membantu Mesir, karena jelas Israel tidak akan melepaskan wilayah yang diduduki di utara, sementara wilayah selatan dirasakan Israel tidak terlalu mendesak. *Kedua*, Jordan juga harus dilibatkan, paling tidak sebagai sekutu potensial untuk memecah konsentrasi Israel. *Ketiga*, Syria dengan Mesir harus bergerak cepat dan harus segera melakukan konsolidasi atas wilayah strategis yang telah diduduki dan menunggu pesawat-pesawat Israel untuk ditembak di garis pertahanan Syria dan Mesir. Israel tidak akan diberi kesempatan untuk melakukan perang terbuka karena superioritas angkatan udaranya dan diharapkan korban-korban awal Israel akan segera terasa. *Keempat*, Kekuatan udara Arab harus disimpan terlebih dahulu dan hanya dipakai setelah sebagian besar angkatan udara Israel dapat dihancurkan. *Kelima*, di selatan, suatu jembatan harus didirikan dengan cepat untuk memindahkan tank-tank Mesir ke sebelah timur Terusan Suez sebelum serangan balasan Israel dilakukan. Pasukan-pasukan infanteri Mesir bertugas pokok mendirikan jembatan tersebut. Di sebelah utara, garis pertahanan Israel bertumpu pada kubu-kubu kecil di berbagai bukit-bukit dan parit-parit anti tank. Untuk menghancurkan pertahanan Israel ini, Syria dan Mesir setuju untuk memobilisasi pasukan-pasukan infanteri yang akan menyerbu diantara bukit-bukit itu dan melicinkan jalan bagi masuknya pasukan-pasukan tank guna merebut Golan. Pasukan-pasukan yang bergerak maju harus dilindungi

dengan sistem pertahanan udara, termasuk yang mobil seperti SAM -6 dan SAM-7¹⁰².

Bagian yang paling penting dan paling kritis dalam seluruh strategi yang dirancang adalah serangan kejutan. Dengan tahapan ini diharapkan Israel dapat kehilangan keseimbangan, walaupun hanya sementara, tetapi paling tidak Mesir dapat melakukan penghancuran parsial pada kekuatan militer Israel. Penyeberangan armada Mesir berhasil sampai melewati Terusan Suez. Pihak Israel tidak mengira hal inilah yang menjadi titik permulaan perang. Israel menyangka penyeberangan pasukan Mesir hanya untuk latihan kemiliteran. Pasukan Mesir yang tanpa membawa persenjataan lengkap dan alat-alat berat tidak akan mungkin menyerang Israel apalagi dengan adanya Benteng Bar-Lev (*Bar-Lev Line*) yang sulit ditembus di perbatasan Mesir-Israel¹⁰³.

Pasukan-pasukan artileri dan peluru-peluru kendali dari darat ke udara dijadikan payung oleh pasukan Mesir yang terus bergerak maju dalam satu langkah brilian, yaitu dinding-dinding pertahanan Israel dibanjiri dengan air dari Terusan Suez dan Benteng Bar-Lev yang dimitoskan lebih tangguh dari garis Maginot Perancis¹⁰⁴ dalam Perang Dunia II ikut hancur secara cepat. Serbuan Mesir dan Syria di hari suci, membuat pertahanan Israel tidak siap melakukan serangan balik. Luas wilayah Israel tidak sebanding dengan Syria dan Mesir, ditambah letak Israel yang diapit oleh negara-negara Arab menyebabkan Israel harus bekerja lebih untuk melakukan pertahanan diri dan melindungi wilayah-wilayahnya yang belum terduduki¹⁰⁵.

Sehari setelah serangan dengan runtuhnya Benteng Bar-Lev, Israel berusaha melakukan serangan balasan pertama. Walaupun tidak siap dengan penyerbuan ini, namun pihak Israel berusaha menggunakan kekuatan militer yang ada. Delapan Oktober 1973, Israel melancarkan serangan balasan pertama terhadap Mesir, namun gagal. Uni Soviet menyuplai persenjataan tambahan ke

¹⁰² *Ibid*, hlm. 84.

¹⁰³ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Op.Cit*, hlm. 85.

¹⁰⁴ Garis Maginot adalah satu garisan kubu konkrit, penghalang tank, senjata api otomatis dan pertahanan lain yang dibangun oleh pihak Perancis sepanjang perbatasannya dengan Jerman dan Italia selepas Perang Dunia II. Lihat: <http://www.indonesiaindonesia.com/f/2430-pd-ii-garis-maginot/>, diakses pada 18/12/09, pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Op,Cit*.

Syria dan Mesir¹⁰⁶. Mesir mendapat bantuan Persenjataan dari Uni Soviet. Rudal-rudal, pesawat tempur dan tank yang dikirimkan Soviet sulit ditembus Israel. Angkatan Udara Israel memang sudah mengenal peluru anti pesawat buatan Soviet seperti SAM-2 dan SAM-3 beberapa tahun sebelumnya, tetapi mereka belum mengenal SAM-5 dan SAM-6 yang ternyata sangat efektif dalam menghancurkan pesawat-pesawat Israel¹⁰⁷. SAM-5 dan SAM-6 merupakan rudal terbaru Soviet yang digunakan Mesir pada Perang Yom Kippur¹⁰⁸.

SAM-6 merupakan rudal bergerak darat ke udara dua tingkat berkemampuan menyerang pesawat-pesawat dalam ketinggian rendah di bawah 12 mil. Namun, jarak jangkauan *extend*-nya dapat mencapai 18 mil, masih efektif guna melumat sasaran lebih tinggi. Setiap baterai SAM-6 mempunyai empat launcher dilengkapi radar penjejak *Long Track* dan radar kontrol penembakan *Strait Flush*. Dengan panjang rudal 20 kaki serta hulu ledak 165 pon, SAM-6 mampu melesat dengan kecepatan mendekati Mach 3. SA-2 *Guideline* atau V-75SM dalam kode Soviet, adalah rudal berpenuntun radio untuk menghancurkan pesawat target berketinggian 25-30 mil di atas permukaan bumi. Setiap situs SAM-2 memuat enam peluncur dilengkapi generator, radar peringatan dini *Spoon Rest*, radar penjejak *Fan Song*, dan radar akuisisi *Squint Eye*. Dengan panjang 27 kaki serta hulu ledak seberat 288 pon, rudal yang pernah dimiliki TNI AU ini ditakuti karena mampu melesat hingga *Mach* 3,5 dengan ketinggian maksimum 60.000 kaki¹⁰⁹. Dengan menggunakan dua jenis rudal baru bantuan Soviet, Mesir berhasil membuat Israel kalah dalam persenjataan perang selama masa perang Arab-Israel berlangsung. Rudal-rudal Soviet ini ternyata efektif untuk menghancurkan pesawat-pesawat Israel.

Keberhasilan Mesir menerobos pertahanan Israel merupakan awal yang gemilang, namun Israel yang segera mendapat bantuan dari Amerika berhasil memukul mundur pasukan Mesir dan Syria. Syria pada tahap awal perang dapat merebut sebagian besar Dataran Tinggi Golan. Akan tetapi pada tahap selanjutnya Syria tidak mampu mempertahankan apa yang sudah direbutnya dan Israel

¹⁰⁶ Angkasa, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁰⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Op.Cit*, hlm. 88.

¹⁰⁸ Lihat gambar. 6.

¹⁰⁹ <http://forum.detik.com/showthread.php?t=58866&styleid=10>, diakses pada 10/12/09, pukul 14.07 WIB.

berhasil memukul mundur tentara Syria dan tentara Iraq yang ikut memperkuat Syria, kembali ke sekitar 20 mil dari Damaskus. Setelah berhasil memukul mundur Syria, Israel kembali memusatkan perhatian ke front Mesir¹¹⁰.

Pada 6 Oktober 1973, Mesir dan Syria melancarkan serangan terkoordinir ke posisi Israel di sepanjang Terusan Suez dan di Dataran Tinggi Golan. Pasukan Mesir menyeberang Terusan, mengamankan bibir pantai di bagian timur Gurun Sinai, menghubungkan Garis Bar-Lev Israel. Pasukan Syria mengalahkan pasukan Israel di Gunung Hermon di bagian utara Israel¹¹¹. Dalam peperangan ini, pasukan Mesir dibantu armada Syria. Serangan Mesir di perbatasan selatan Israel membawa hasil dengan runtuhnya Benteng Bar-Lev sehingga memudahkan pasukan Mesir masuk ke wilayah Israel. Di wilayah utara, Syria juga berhasil memasuki wilayah Israel dan menduduki Dataran Tinggi Golan¹¹².

Syria berhasil menginvasi Dataran Ringgi Golan dan membawa delapan ratus tank melintasi perbatasan garis gencatan senjata pada Perang Enam Hari. Syria juga berhasil mendarat di gunung Hermon dan merebut posisi Israel. Invasi ini menyebabkan tentara Israel mengungsi ke beberapa pos pengungsian¹¹³. Artileri yang diunakan Syria dalam pertempuran ini adalah Rudal SAM-6 buatan Soviet dan Meriam anti serangan ZSU-23/4¹¹⁴ yang dapat mengalahkan pesawat A-4 *Skyhawk*¹¹⁵ milik Israel.

Kemenangan berpihak pada Syria yang berhasil memukul mundur pasukan Israel. Posisi pasukan Syria yang disiapkan menyerbu lewat lereng-lereng gunung itu bahkan telah membuat serbuan dadakan. Serangan frontal yang tak terduga ini langsung disambut oleh pasukan Brigade Golani yang sempat terkejut oleh serangan dadakan itu Namun ketidaksiapan pertahanan Israel mengakibatkan ketidakseimbangan perlawanan. Serangan tank Syria yang jumlah dan kekuatannya lebih unggul dari Israel berhasil membuat pasukan Golani mundur.

¹¹⁰ Angkasa *Op.Cit*, hlm. 87.

¹¹¹ *Ibid.*

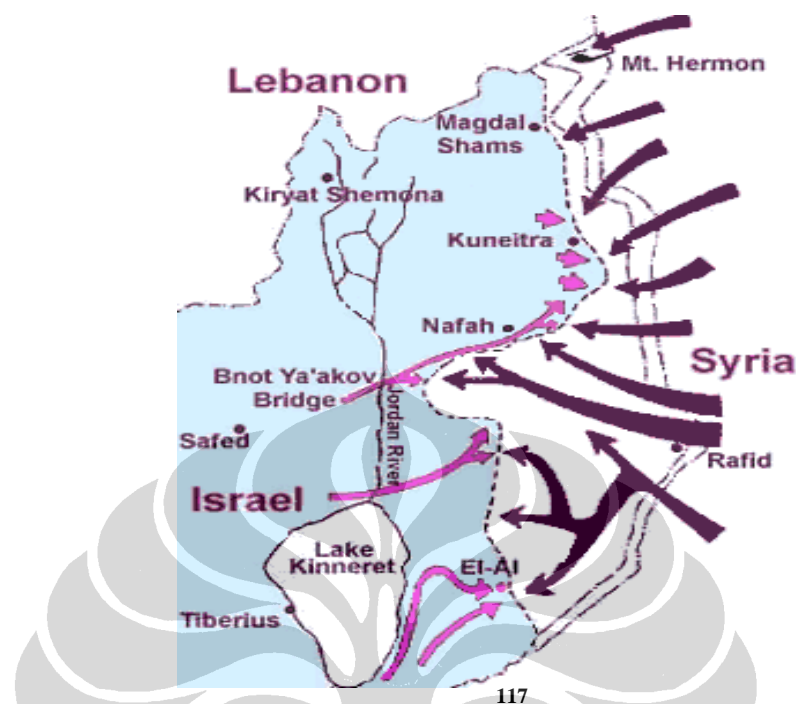
¹¹² John G. Stoessinger. *Why Nation Go to War*. New York: St. Martin's Press, 1993, hlm. 161.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 162.

¹¹⁴ Lihat: Gambar 7.

¹¹⁵ Lihat: Gambar 8.

Mundurinya pasukan Golani berarti berhasilnya pendudukan Syria di Gunung Hermon¹¹⁶.



Syria terus melancarkan serangan sampai malam hari. Armada Syria yang dilengkapi teropong malam membantu perlawanannya terhadap Israel. Israel yang belum mendapatkan bantuan militer dari Amerika tidak dapat menahan serangan-serangan Syria. Pertempuran sengit yang berlangsung di kawasan yang dikenal sebagai Lembah Air Mata (*Valley of Tears*) itu didominasi oleh superioritas tank dan artileri Syria¹¹⁸.

Strategi serangan kejutan oleh militer Mesir dan Syria membuktikan bahwa pertahanan Israel ternyata dapat ditembus oleh bangsa Arab. Gempuran Mesir pada minggu pertama perang berhasil membuktikan pada Israel bahwa lawan perang selemah apapun bila diremehkan akan menjadi senjata bagi dirinya sendiri karena kesombongan adalah awal dari kelengahan.

3.2.3 Mengembargo Minyak

Dua strategi Mesir telah dilancarkan dalam perang. Walaupun Mesir dan Syria berhasil membuat terapi kejutan bagi Israel dan Amerika sebagai pendukung

¹¹⁶ Angkasa, *Op.Cit*, hlm. 53.

¹¹⁷ <http://www.jafi.org.il/education/100/maps/syria.html>, diakses pada 09/12/09, pukul 08.30 WIB.

¹¹⁸ Angkasa, *Op.Cit*, hlm. 56.

utama membantu kemenangan Israel. Israel tidak dapat bertahan lama dalam peperangan karena jumlah persenjataannya yang lebih sedikit dibandingkan dengan Mesir dan Syria. Namun, bantuan Amerika berupa amunisi-amunisi canggih dapat membuat Israel melakukan serangan balik kepada Mesir dan Syria. Ketika bantuan persenjataan yang dikirimkan Soviet ke Mesir tidak cukup untuk menandingi bantuan Amerika ke Israel, maka harus ditempuh dengan jalan lain. Mesir melihat adanya kesempatan terbuka pada bidang perekonomian. Industri-industri negara barat pendukung Israel akan berhenti tanpa pasokan minyak negara-negara Arab.

Minyak adalah faktor penting bagi perindustrian negara-negara Barat. Sementara itu, Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak terbesar di dunia. Dengan digunakannya minyak Arab secara efektif oleh negara-negara Arab untuk menekan negara-negara industri pendukung Israel dan untuk merubah hubungan tak adil antara negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang, kawasan itu muncul dalam percaturan politik dunia sebagai kekuatan baru yang harus diperhatikan dan diajak bicara mengenai masalah-masalah dunia¹¹⁹.

Cadangan minyak Arab yang telah terbukti adalah dua pertiga cadangan minyak dunia yang dikenal. Karena berbagai faktor eksploitasinya mudah dan biayanya rendah, sehingga produksi minyak Timur Tengah terus meningkat dengan cepat dan kini merupakan sekitar 40% produksi minyak dunia. Eropa Barat mendapatkan 70% kebutuhan minyaknya dari kawasan itu dan Jepang bahkan 80%¹²⁰. Atas dasar inilah penetapan embargo minyak dilakukan oleh negara-negara penghasil minyak guna membantu masalah yang melanda Mesir dan Syria.

Proses Embargo bukan dilaksanakan oleh Mesir. Tetapi Mesirlah yang meminta Negara-negara Arab untuk membantunya dalam perang untuk menghentikan serangan Israel. Hubungan Sadat dengan Raja Faisal selaku Raja Arab Saudi waktu itu cukup Erat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sadat:

Persahabatan pribadi antara kami dimulai ketika saya menghadiri Konferensi Islam yang pertama di Riyadh, tahun 1955. Waktu itu Faisal

¹¹⁹ Riza Sihbudi, dkk. 1983. *Op.Cit*, hlm. 31-32.

¹²⁰ Kirdi Dipoyudo. *Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: CSIS, 1977, hlm. 32.

masih putra mahkota. Arab Saudi, Mesor, dan Pakistan adalah pencetus konferensi ini. Kendati Perang Yaman berkecamuk, kami tetap bersahabat¹²¹.

Kedekatan antara Sadat dengan Raja Faisal, membawa dampak positif bagi Mesir, Raja Faisal membantu proses embargo Mesir. Seperti pernyataan Sadat:

Beberapa orang menyangka saya meminta Raja Faisal membantu kami dengan menggunakan minyak sebagai senjata. Tidak benar, apa yang saya katakan kepadanya hanyalah, menjadi kewajiban bagi saya untuk menggerakkan situasi secara militer dan berperang. “Adapun peranan saudara, kata saya, terserah kebijaksanaan saudara sendiri. Lakukanlah apa yang terbaik menurut saudara.” Saya tegaskan lagi, “Saudaralah yang menjadi kepala keluarga, dan kepala keluargalah yang lebih mengetahui apa yang berada di dalam keluarga”¹²².

Melalui pendekatan Mesir dengan Arab Saudi, proses embargo minyak pun berhasil dijalankan. Sebagai tanggapan atas seruan-seruan di dunia Arab agar minyak digunakan sebagai senjata untuk memukul pendukung-pendukung Israel, pada 17 Oktober 1973, wakil-wakil negara penghasil minyak Arab memutuskan untuk menggunakan senjata minyak sebagai dukungan bagi Mesir dan Syria untuk melawan Israel. Kecuali Irak, negara-negara penghasil minyak memutuskan untuk mengurangi produksi minyak secara berangsur-angsur sampai tercapai sasaran politik mereka, yaitu penarikan Israel dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya. Produksi minyak akan dikurangi 5% per bulan. Arab Saudi dan Kuwait bahkan mulai dengan pengurangan 10% sampai akhir November. Dua hari kemudian Abu Dhabi mulai menghentikan penjualan minyak kepada Amerika Serikat, segera disusul oleh negara-negara lainnya¹²³.

Tabel Embargo Minyak¹²⁴

No.	NAMA	Cadangan (barel)	Produksi Sehari		Ekspor 1974
			1971	1974	
1	Aljazair Arab	7.600.000.000	603.000	1.100.000	4.900
2	Saudi	132.000.000.000	4.456.000	8.500.000	28.900
3	Bahrain	400.000.000	--	70.000	500
4	Irak	31.500.000.000	1.692.000	2.000,000	7.600

¹²¹ Anwar Sadat. *Tokoh-tokoh Pemimpin yang Saya Kenal*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1987, hlm. 87.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hlm. 33.

¹²⁴ Kirdi Dipoyudo, *Op.Cit.*, hlm. 38.

5	Iran	60.000.000.000	4.514.000	6.100.000	20.900
6	Kuwait	64.000.000.000	2.985.000	2.200.000	8.500
7	Libya	25.500.000.000	4.205.000	2.200.000	8.900
8	Oman	5.300.000.000	--	300.000	1.100
9	Qatar	6.500.000.000	425.000	500.000	1.900
10	UEA	24.000.000.000	900.000	1.800.000	6.500

Dengan adanya kesadaran itu pula negara-negara OPEC dapat secara sepihak menaikkan harga minyak 70% bulan Oktober 1973 dan 130% lagi pada bulan Desember berikutnya. Dengan demikian pendapatan ekspor negara-negara pengembargo meningkat menjadi empat kali lipat. Dari tabel embargo minyak, dapat dilihat bahwa pendapatan ekspor minyak Arab Saudi naik dari US \$ 2.800 juta pada tahun 1972 menjadi US \$ 28.900 juta tahun 1974, dan pendapatan Iran dari US \$ 2.400 juta tahun 1972 menjadi US \$ 20.900 juta tahun 1974. Sebagai keseluruhan pendapatan ekspor minyak negara-negara Timur Tengah meningkat dari US \$ 10.100 juta pada tahun 1972 menjadi US \$ 88.100 juta pada tahun 1974. Dengan demikian negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Pendapatan mereka bahkan melebihi daya serap perekonomian mereka, sehingga terbentuk suatu kelebihan petrodollar yang besar.

Pengurangan produksi berakhir pada bulan Desember 1973 setelah tujuan politik negara-negara Arab tercapai. Tetapi kenaikan harga minyak yang merupakan pukulan berat bagi banyak negara adalah suatu kenyataan yang mutlak bagi negara-negara pengekspor minyak¹²⁵. Pasokan harga minyak yang dinaikkan oleh negara Arab tidak diturunkan kembali ke harga semula. Walaupun pada akhirnya kenaikan harga tersebut berhenti dan Israel segera melakukan gencatan tetapi kesepakatan tidak membuat harga minyak menjadi turun.

Iran adalah negara pertama yang mensponsori tindakan untuk memanfaatkan kondisi yang diciptakan penggunaan senjata minyak Arab itu guna meningkatkan pendapatan negara-negara penghasil sampai 7 kali lipat tingkat pendapatan pada tahun 1970. Keputusan OPEC untuk menggunakan senjata minyak itu diambil semata-mata untuk menekan Israel dan pendukung-pendukungnya. Sidang OPEC di Jenewa pada 17-19 Januari 1974 mengukuhkannya. Harga dibekukan untuk tiga bulan, sedangkan negara-negara

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 34.

industri diperingatkan untuk mengekang tren inflasi yang tinggi dan cara perusahaan-perusahaan minyak meningkatkan harga produk minyak bagi para konsumen. Harga minyak itu dibekukan lagi pada sidang OPEC berikutnya, pada 16-17 Maret 1974¹²⁶.

Dengan adanya kesadaran itu pula negara-negara OPEC dapat secara sepihak menaikkan harga minyak 70% bulan Oktober 1973 dan 130% lagi pada bulan Desember berikutnya dan dengan demikian meningkatkan pendapatan ekspor minyak sehingga. negara-negara Arab meraih keuntungan berlipat dalam embargo ini.

3.3 Dampak Perang Yom Kippur

Meski akhirnya pada hari ke-10 peperangan atau pada 15 Oktober 1973 Divisi Lapis Baja ke 143 Israel berhasil menghambat serangan pasukan darat Mesir, dunia tetap melihat bahwa sesungguhnya Mesir lah yang memenangkan peperangan ini. Dalam hal ini, dapat dikatakan Israel telah terperdaya sedemikian rupa sehingga dibuat tak mampu mengantisipasi serangan Mesir dengan Syria¹²⁷.

Berakhirnya Perang Yom Kippur ditandai dengan adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.338 mengenai gencatan senjata¹²⁸. *Pertama*, menghimbau kepada semua pihak yang sekarang sedang berperang untuk menghentikan kegiatan tembak-menembak dan segera mengakhiri semua kegiatan militer, tidak melewati batas waktu 12 jam setelah disahkannya keputusan ini di tempat-tempat yang mereka duduki sekarang. *Kedua*, menghimbau kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menghentikan tembak menembak segera setelah dilaksanakannya Resolusi Dewan Keamanan Nomer 242 (pada Perang Enam Hari) tentang gencatan senjata dan semua bagiannya. *Ketiga*, memutuskan bahwa, segera dan beramaan dengan gencatan senjata, negosiasi-negosiasi akan segera dimulai antara pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan yang tepat untuk menegakkan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah¹²⁹.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 34-35

¹²⁷ Angkasa *Op.Cit*, hlm. 16-17.

¹²⁸ Lihat: Lampiran No.1.

¹²⁹ Machnun Husein. *Prospek Perdamaian di Timur Tengah (Sebuah Tilikan Latar Belakang)*. Terj. Husein, Machnun, M. Sadi Susanto, dan Kardimin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 173

Beberapa hal lain adalah bahwa dalam Resolusi 338 terdapat pada poin ke 3; kata-kata yang dipakai bukan lagi *call upon the parties* (menyerukan kepada pihak-pihak) tetapi *decides* (memutuskan) dan *concurrently with the cease-fire* (bersamaan dengan gencatan senjata) dan segera memulai negosiasi *under appropriate auspices* (di bawah pengawasan yang tepat)¹³⁰. Resolusi tidak menyebutkan negara mana yang menjadi *auspices* (naungan) itu, tetapi cukup jelas bahwa yang dimaksudkan adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Resolusi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, Ariel Sharon¹³¹ dan tentaranya justru mendesak maju dan mengambil sebagian wilayah Mesir (Suez) dengan logika : “Jika kami menyerang dan mereka menyerah, kami masuk. Tetapi jika mereka bertahan dan kami harus kembali, mereka menang”¹³².

Sikap Sharon tersebut jelas berlawanan dengan isi Resolusi nomor satu¹³³. PBB mengeluarkan Resolusi No.338 karena Israel tidak melaksanakan Resolusi No.242. Melihat hal tersebut belum efektif bagi Mesir dan Israel, PBB mengutus pengamat di wilayah konflik¹³⁴. Tindakan PBB ini mengacu pada Resolusi No.2¹³⁵. Cara ini berhasil hingga terjadinya gencatan senjata sampai 26 Oktober 1973. Bentuk penerapan Resolusi No.3 adalah bertemunya kedua pihak antara Mesir dengan Israel di meja perundingan. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang pertama kali selama perang Arab–Israel sejak tahun 1949¹³⁶.

Kesuksesan serangan Mesir membawa nama Anwar Sadat melambung sebagai penggagas perang Yom Kippur. Mesir sebagai negara pemersatu Arab berhasil membuktikan perannya. Dalam perang ini, sejumlah negara Arab berhasil dihimpun untuk menggunakan kekuatannya sebagai senjata melawan negara maju pendukung Israel. Kekuatan gabungan negara-negara Arab menghasilkan dampak krisis energi berkepanjangan. Walaupun wilayah Mesir dan Syria belum sepenuhnya dikembalikan oleh Israel namun krisis ekonomi yang

¹³⁰ Lihat: Lampiran No.1.

¹³¹ Lahir di Kafal Mal pada 1928 dan menjadi pemimpin Divisi Israe dalam Perang Yom Kippur. Lihat: <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/sharon.html>, diakses pada 09/12/09, pukul 08.30 WIB.

¹³² Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Op.Cit*, hlm. 89.

¹³³ Lihat: lampiran No.1.

¹³⁴ Lihat: Angkasa *Op.Cit*, hlm. 21.

¹³⁵ Lihat: lampiran No.1.

¹³⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Op.Cit*, hlm. 89.

melanda negara sekutu Israel membuat mereka berpaling menjadi pendukung Arab.

Prestasi tersebut merupakan kemenangan psikologis bagi dunia Arab yang hampir kehilangan kepercayaan diri pada Perang Enam Hari. Bangsa-bangsa Arab merasa bahwa dengan latihan yang baik dan peralatan yang memadai, mereka ternyata dapat berdiri sejajar dengan Israel, bahkan mungkin dapat mengalahkannya. Perasaan senang karena kemenangan ini merupakan hasil terbesar dari usaha Mesir dan Syria dalam Perang Yom Kippur 1973¹³⁷.

Meskipun kalah dalam militer, prestise Mesir di dunia Arab mulai berubah. Opini masyarakat dunia mulai beralih menjadi pro-Mesir dan simpati PBB pada Israel mulai memudar. Di Mesir dan dunia luas, perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme semakin meluas, khususnya dalam berjuang melawan Israel. Tetapi, perjuangan-perjuangan fisik melawan Israel telah menghabiskan waktu yang lama dan hanya menyiksakan kesengsaraan bagi negara perang. Oleh karena itu, Sadat menghubungi Amerika untuk mengambil jalan damai dalam penyelesaian permasalahan ini¹³⁸.

Usaha-usaha diplomasi bolak-balik yang dikerjakan oleh Kissinger pada gilirannya melahirkan dua buah persetujuan peleraian pasukan-pasukan Mesir dan Israel (*disengagement of forces*) yang terkenal dengan Persetujuan Sinai I dan Persetujuan Sinai II. Persetujuan Sinai I ditandatangani pada 18 Januari 1974 yang berisi penarikan mundur pasukan-pasukan Israel ke suatu garis 20 mil dari posisi yang mereka duduki di sebelah timur Terusan Suez dan penempatan pasukan Mesir di pinggir pantai timur Terusan serta menempatkan pasukan PBB di antara kedua belah pihak. Persetujuan Sinai I juga memutuskan dilepaskannya kepungan tentara Israel terhadap *Egyptian Third Army*. Persetujuan Sinai II ditandatangani oleh Mesir ke dekat garis pertahanan dan menetapkan sebuah zone netral dengan pasukan PBB berada di dalamnya¹³⁹.

Kemunduran yang terjadi dalam beberapa hari pertama membekas di benak Israel, sehingga kemenangan singkat Arab dihargai oleh mereka. Meskipun

¹³⁷ Ibid, hlm. 86.

¹³⁸ Roy Andersen, Robert F Selbert, John G. Wagner. *Politics and Change in The Middle East: Sources of Conflict and Accomodation*. New Jersey: Pearson Prentice, 2007, hlm. 273.

¹³⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Op.Cit*, hlm. 90-91.

kalah, Presiden Sadat mengumumkan bahwa serangan “Mesir telah menampilkan sebuah keajaiban pada standar militer” dan “mengembalikan kehormatan negara”. Mesir dan Syria telah berhasil keluar dari rasa keputus asaan dan memperlihatkan kepada Israel untuk siap menerima resiko bila tetap tinggal di wilayah yang didudukinya dengan serangan yang lain¹⁴⁰.

Kutipan dari Menteri Luar Negeri Mesir, Nubar Nubaryan Pasha atas kemenangan Mesir–Israel adalah bahwa Mesir akhirnya dapat menunjukkan kekuatannya, Mesir tidak lemah serta Israel tidaklah “tak terlihat”¹⁴¹.

Situasi akhir perang dengan kondisi apapun tidaklah menguntungkan karena banyaknya nyawa yang harus terenggut. Perang antara dua negara selalu membawa dampak yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Perdamaian adalah sesuatu yang paling indah. Namun, ketika perang harus dicapai untuk meraihnya jadikanlah perang itu sebagai tujuan dari perdamaian.

¹⁴⁰ John G. Stoessinger. *Op.Cit*, hlm. 164.

¹⁴¹ *Ibid.*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perang Yom Kippur adalah perang bersejarah Mesir atas kemenangan strateginya melawan Israel. Serangan Mesir ke Israel bersamaan pada hari suci Yom Kippur membuat militer Israel kewalahan. Ketidaksiapan penjagaan Israel terhadap serangan kejutan Mesir adalah sebuah bukti bahwa Israel bukanlah negara yang tidak terkalahkan. Bantuan Syria dan Irak pada pengempuran dan pengepungan sebagian wilayah Israel juga membuktikan bahwa Israel dapat dihadapi dengan persatuan yang kuat dari pihak Arab. Selain itu, perang yang terjadi selama dua puluh hari tersebut membawa dampak ekonomi bagi negara-negara Arab maupun negara pendukung Israel.

Negara-negara Arab membentang dari Asia bagian barat hingga ke sebagian wilayah Afrika. Suatu wilayah yang seharusnya damai dan bersatu ini justru berkebalikan pada kenyataannya karena konflik-konflik dengan Israel. Mesir adalah negara yang memiliki pengaruh penting di Timur tengah. Hal ini terbukti dengan banyaknya keterlibatan Mesir dalam beberapa organisasi regional. Organisasi regional Mesir dilator belakang oleh factor letak dan hubungan politiknya terhadap negara-negara sekitar. Hal ini berdampak positif bagi Mesir terutama dalam bantuan dari negara-negara sekitar pada Perang yom Kippur. Organisasi pemersatu Arab, salah satunya Liga Arab didirikan untuk mempersatukan kawasan regional ini. Namun perbedaan kepentingan dan urusan dalam negeri masing-masing membuat organisasi ini tidak berdampak banyak pada masing-masing negara.

Amerika sebagai kekuatan super di dunia Internasional berusaha menghambat paham dan ideologi Soviet. Perbedaan ideologi dua negara *super power* ini memecah dunia menjadi dua kubu. Satu kubu berpaham liberal dan lainnya berpaham komunis. Namun, keruntuhan Soviet membawa dampak bagi negara-negara Arab, mereka menjadi tidak stabil pada awal keruntuhan Soviet. Hal ini berdampak pada Israel yang menjadi semakin kuat. Negara pendukung

dari negara saingannya sudah tidak ada. Ini menandakan negara-negara Arab sudah dipecah dan mudah dikuasai wilayahnya.

Jika saja persatuan Arab itu dapat “menghantam” Israel ditahun 1973, maka seharusnya akar konflik Arab–Israel akan segera selesai dengan bersikap seperti itu di setiap permasalahan. Faktor lain yang timbul adalah adanya konflik-konflik dalam negeri. Beragamnya persengketaan Arab, baik dari dalam maupun luar negeri membuat Arab menjadi tidak stabil. Akan tetapi permasalahan ini terbukti dapat diatasi oleh Mesir selama tahun 1973. Walaupun dampak dalam negeri Mesir diakhir perang besar pengaruhnya terhadap kehidupan dalam negeri Mesir, Sadat dapat membuktikan kepada rakyatnya bahwa Mesir sebagai negara pemrakarsa persatuan Arab berhasil menorehkan sejarah kemenangan Arab pada dunia.

Tiga strategi Mesir (keterlibatan media massa, penyerangan kejutan, dan mengembargo minyak) dalam Perang Yom Kippur terlihat membekas bagi Israel. Turunnya beberapa tokoh penting dari kursi pemerintahan menandakan ketidakpercayaan rakyat Israel kepada pemerintah saat itu. Pembalasan kekalahan pada Perang Enam Hari dinilai berhasil oleh kalangan Arab dan dunia. Sadat berhasil menarik simpati dunia internasional mengenai masalah perbatasan. Walaupun wilayah Mesir belum kembali pada akhir perang, setidaknya masalah ini tidak dilupakan begitu saja oleh Dewan PBB.

Kelemahan Israel terlihat pada dua pekan pertama peperangan. Jika saja Amerika tidak segera mengirimkan bantuan perang, maka seluruh wilayah Israel sudah dikuasai oleh negara Arab. Persatuan negara Arab selama beberapa waktu ini berdampak besar bagi dunia. Sebagai bukti solidaritas, negara-negara yang tidak berperang mengambil tindakan untuk mengembargo negara-negara pendukung Israel. Namun solidaritas ini ternyata hanya bersifat sementara. Setelah perang usai, masing-masing negara kembali lagi dengan kepentingan pribadi masing-masing yang menguntungkan.

4.2 Saran

Belajar dari pengalaman perang yang dilakukan antara Arab–Israel dengan melihat berbagai kekalahan yang melanda negara-negara Arab membuat Israel

besar kepala. Israel mengklaim bahwa militer negaranya tak dapat dikalahkan oleh militer Arab. Teknologi canggih yang dimiliki Israel dinilai tidak sebanding dengan negara tetangganya. Namun, strategi perang Mesir di tahun 1973 terbukti dapat mematahkan doktrin Israel.

Setelah melalui proses penelitian dan pembahasan, dari beberapa sumber, penelitian yang belum ditemukan pada penulisan ini adalah masalah kelalaian MOSSAD, Agen Intelijen Israel yang mengetahui lebih awal serangan Mesir. Informasi MOSSAD ini diabaikan oleh Golda Meir. Peneliti belum menemukan apa yang menyebabkan Golda Meir tidak mengindahkan peringatan dari MOSSAD padahal agen intelijen ini terbukti berhasil dalam penyadapan informasi yang akurat pada Perang Enam Hari. Pemerintah Israel dan Amerika saat itu terpengaruh oleh informasi-informasi pers Mesir mengenai lemahnya pertahanan Mesir setelah Perang Enam hari.

Penulis berharap sumber informasi dan data yang tidak ditemukan dalam penelitian kali ini dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Karena permasalahan ini cukup menarik. MOSSAD sebagai Agen Informasi yang terpercaya keakuratannya diacuhkan oleh pemerintahnya sendiri tanpa alasan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andersen, Roy.R., Robert F Silbert, John G. Wagner. *Politics and Change in The Middle East: Sources of Conflict and Accomodation*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri. *Masalah Palestina Sejak 1977 Sampai Sekarang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1986
- Clausewitz. *On War*. Princeton University press. New Jersey: Princeton University press, 1976.
- David, Ron. *Arab Israel untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2007
- Dipoyudo, Kirdi. *Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia*. Jakarta: Center for Strategic International Studies, 1981
- Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: Center for Strategic International Studies, 1977
- Edition Assouline. *Les Symbols Du Judaisme*. Terj. Mimi Tompkins in collaboration with Liz Ayres. New York: St. Martin's Press, 1997.
- Garaudy, R. *Kasus Israel Studi tentang Zionisme Politik*. Terj. Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Heikal, Mohamed. *Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan*. Terj. Arwah Setiawan. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1986.
- , *Latar Belakang Perang Arab-Israel*. Jakarta: Badan Penerbit Alda, 1978
- Howard, Michael. *Clausewitz Mahaguru Perang Modern*. Terj. Ari Anggari. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1993
- Sadat, Anwar. *Tokoh-Tokoh Pemimpin Yang Saya Kenal*. Terj. Ermas. Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah Ketidakbijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2007
- Sihbudi, Riza., M. Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnain. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT Eresco, 1983
- Sihbudi, Riza, dkk. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Stoessinger, John. G. *Why Nation Go to War*. New york: St. Martin's Press, 1993.
- Husein, Machnun. *Porspek Perdamaian di Timur Tengah*. Terj. Husein, Machnun, M. Hadi Susanto, dan Kardimin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Windrow, Martin and Francis K. Mason. *The World's Greatest Military Leaders*. England: Grange Books PLC, 2000

SERIAL

Artikel Jurnal

Beattie, Kirk J. "The Journal of Public and International Affairs". *Egypt During The Sadat Years*, 1986.

Artikel Majalah

Angkasa Edisi koleksi *The Yom Kippur War October 1973*. No.XLII 2007.

Mannes, Aaron. "Policy Review". *A Reformer in Egypt*. December 2002&January 2003.

Publikasi Elektronik

"Quincy Wright", diakses pada 12/12/2009, pukul 03.09 WIB.
(http://wapedia.mobi/en/Quincy_Wright)

Omuyung. "Kemungkinan Ancaman Aktual dan Potensial terhadap Kedaulatan NKRI", diakses pada 12/12/09, pukul 15.44 WIB.
(<http://omuyung.blogspot.com/2009/03/kemungkinan-ancaman-aktual-dan.html>)

Fahrudin, Sigit. "Pengertian Perang atau Sengketa Bersenjata Internasional", diakses pada 10/12/09, pukul 09.59 WIB.
(http://www.sigitfahrudin.co.cc/2009_04_01_archive.html)

"Branches", diakses pada 10/12/09, pukul 10.11 WIB. (<http://www.mmc.gov.eg/>)

"Liga Arab", diakses pada 10/12/09, pukul 10.32 WIB.
(<http://poltimteng.blogspot.com/2009/11/liga-arab.html>)

“Deklaration of The Arab Summit Conference at Algiers”, 09/12/09, diakses pada pukul 08.30 WIB.

(<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/arabsum73.html>)

“Biography of Golda Meir”, diakses pada 10/12/09, pukul 10.58 WIB.

(http://www.zionism-israel.com/bio/golda_meir_biography.htm)

“Golda Meir”, diakses pada 20/12/09, pukul 09.03 WIB.

(<http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/State/Golda+Meir.htm>)

“Golda Meir”, diakses pada 10/12/09, pukul 11.31 WIB.

(<http://www.notablebiographies.com/Ma-Mo/Meir-Golda.html>)

Dewitri. “Resolusi konflik Arab-Israel”, diakses pada 10/12/09, pukul 13.03 WIB.

(<http://dewitri.wordpress.com/2009/01/03/resolusi-konflik-arab-israel>)

Vivarocka. “Pertarungan Elektronik di Lembah Bekaa”, diakses pada 10/12/09, pukul 14.07 WIB.

(<http://forum.detik.com/showthread.php?t=58866&styleid=10>)

“Salahuddin Ayubi”, diakses pada 16/12/09, pukul 13.07 WIB.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Salahuddin_Ayyubi)

“General Staff, Chiefs of Staff Through The Ages”, diakses pada 20/12/09, pukul 09.30 WIB.

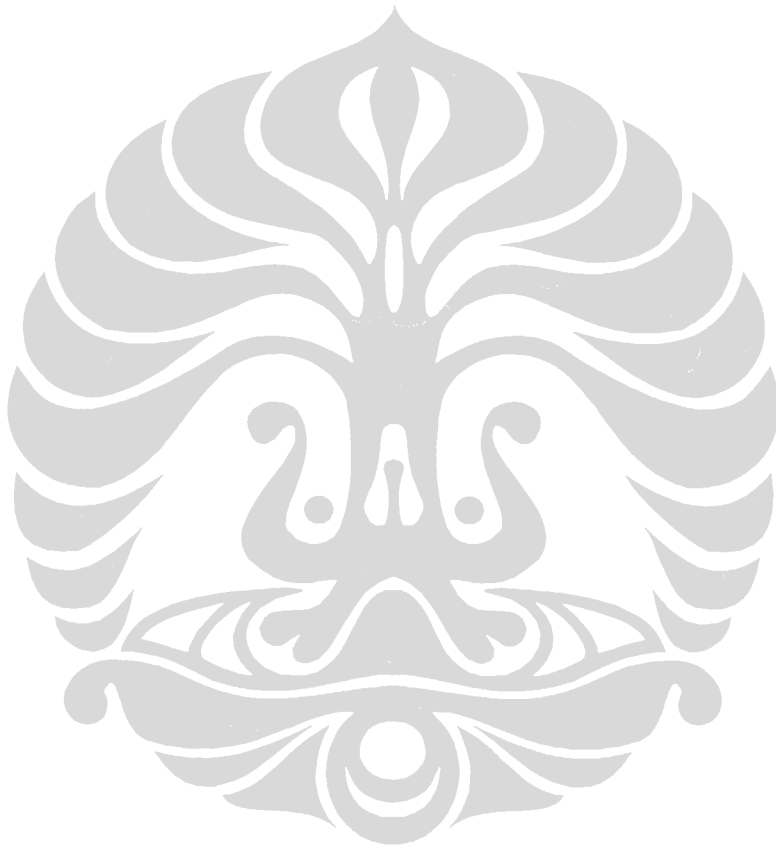
(http://dover.idf.il/IDF/English/about/staff/through_the_ages/default.htm)

Anin, Peter. “New Beginning”, 31 Agustus 2005, diakses pada 20/12/09, pukul 10.00 WIB.

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/fooc50/4135816.stm)

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Resolusi Dewan Keamanan PBB No.338 1973)



At its 1736th meeting, on 13 August 1973, the Council decided to invite the representatives of Lebanon, Israel, Egypt and Iraq to participate, without vote, in the discussion of the item entitled "The situation in the Middle East: Letter dated 11 August 1973 from the Permanent Representative of Lebanon to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/10983)".²⁴

At its 1737th meeting, on 14 August 1973, the Council decided to invite the representative of Democratic Yemen to participate, without vote, in the discussion of the question.

Resolution 337 (1973)

of 15 August 1973

The Security Council,

Having considered the agenda contained in document S/Agenda/1736,

Having noted the contents of the letter from the Permanent Representative of Lebanon addressed to the President of the Security Council (S/10983),

Having heard the statement of the representative of Lebanon concerning the violation of Lebanon's sovereignty and territorial integrity and the hijacking, by the Israeli air force, of a Lebanese civilian airliner on lease to Iraqi Airways,²⁵

Gravely concerned that such an act carried out by Israel, a Member of the United Nations, constitutes a serious interference with international civil aviation and a violation of the Charter of the United Nations,

Recognizing that such an act could jeopardize the lives and safety of passengers and crew and violates the provisions of international conventions safeguarding civil aviation,

Recalling its resolutions 262 (1968) of 31 December 1968 and 286 (1970) of 9 September 1970,

1. *Condemns* the Government of Israel for violating Lebanon's sovereignty and territorial integrity and for the forcible diversion and seizure by the Israeli air force of a Lebanese airliner from Lebanon's air space;

2. *Considers* that these actions by Israel constitute a violation of the Lebanese-Israeli Armistice Agreement of 1949, the cease-fire resolutions of the Security Council of 1967, the provisions of the Charter of the United Nations, the international conventions on civil aviation and the principles of international law and morality;

3. *Calls* on the International Civil Aviation Organization to take due account of this resolution when considering adequate measures to safeguard international civil aviation against these actions;

²⁴ *Ibid.*, Supplement for July, August and September 1973.

²⁵ *Ibid.*, Twenty-eighth Year, 1736th meeting.

4. *Calls* on Israel to desist from any and all acts that violate Lebanon's sovereignty and territorial integrity and endanger the safety of international civil aviation and solemnly warns Israel that, if such acts are repeated, the Council will consider taking adequate steps or measures to enforce its resolutions.

Adopted unanimously at the 1740th meeting

Decisions

At its 1743rd meeting, on 8 October 1973, the Council decided to invite the representatives of Egypt, Israel and the Syrian Arab Republic to participate, without vote, in the discussion of the item entitled "The situation in the Middle East: Letter dated 7 October 1973 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/11010)".²⁶

At its 1745th meeting, on 11 October 1973, the Council decided to invite the representatives of Nigeria and Saudi Arabia to participate, without vote, in the discussion of the item.

Resolution 338 (1973)

of 22 October 1973

The Security Council

1. *Calls upon* all parties to the present fighting to cease all firing and terminate all military activity immediately, no later than 12 hours after the moment of the adoption of this decision, in the positions they now occupy;

2. *Calls upon* the parties concerned to start immediately after the cease-fire the implementation of Security Council resolution 242 (1967) in all of its parts;

3. *Decides* that, immediately and concurrently with the cease-fire, negotiations shall start between the parties concerned under appropriate auspices aimed at establishing a just and durable peace in the Middle East.

*Adopted at the 1747th meeting by 14 votes to none*²⁷

²⁶ *Ibid.*, Twenty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1973.

²⁷ One member (China) did not participate in the voting.

**Secret Resolutions of the Algiers Summit Conference From AI-Nahar,
Beirut, 4 December 1973**

a. The Current Goals of the Arab Nation

The Conference resolves that the goals of the current phase of the common Arab struggle are:

1. The complete liberation of all the Arab territories conquered during the aggression of June 1967, with no concession or abandonment of any part of them, or detriment to national sovereignty over them.
2. Liberation of the Arab city of Jerusalem, and rejection of any situation which may be harmful to complete Arab sovereignty over the Holy City.
3. Commitment to restoration of the national rights of the Palestinian people, according to the decisions of the Palestine Liberation Organization, as the sole representative of the Palestinian nation. (The Hashemite Kingdom of Jordan expressed reservations.)
4. The Palestine problem is the affair of all the Arabs, and no Arab party can possibly dissociate itself from this commitment, in the light of the resolutions of previous Summit Conferences.

b. Military

In view of continuation of the struggle against the enemy until the goals of our nation are attained, the liberation of the occupied territories and the restoration of the national rights of the Palestinian people, the Conference resolves:

1. Solidarity of all the Arab States with Egypt, Syria and the Palestinian nation, in the common struggle for attainment of the just goals of the Arabs.

2. Provision of all means of military and financial support to both fronts, Egyptian and Syrian, to strengthen their military capacity for embarking on the liberation campaign and standing fast in face of the tremendous amount of supplies and unlimited aid received by the enemy.

3. Support of Palestinian resistance by all possible measures, to ensure its active role in the campaign.

c. Economic

Considering the significance of the economy in the campaign against the enemy, and the need to use every weapon at the disposal of the Arabs, as well as to concentrate all resources to enhance fighting capacity, the Conference resolves:

1. To strengthen economic ties among the Arab States, and empower the Arab Economic Council to set up a plan of operations to that end.

2. To continue the use of oil as a weapon in the campaign, in view of the resolutions of the oil Ministers and the link between the revocation of the ban on oil exports to any country and the commitment of that country to support the just cause of the Arabs. To establish a committee, subordinate to the oil Ministers, which will follow up the implementation of these resolutions and those of the oil Ministers with regard to the percentage of the cut in oil supply, so as to arrive at coordination between this committee and the committee of Foreign Ministers of the oil-producing countries in respect of the development of the positions of other countries vis-à-vis the Arab cause.

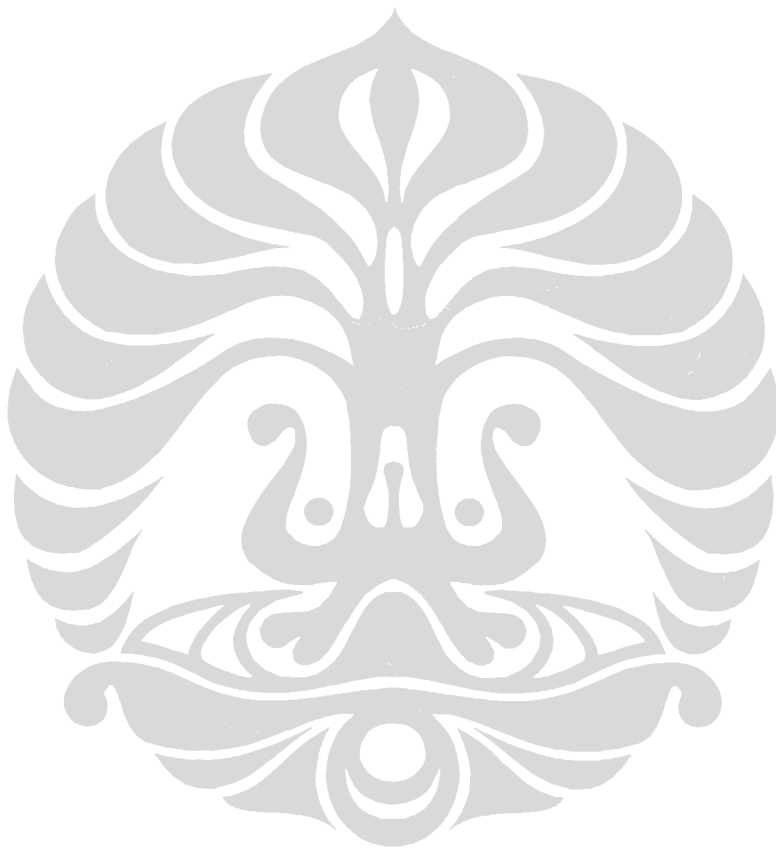
3. To strengthen, as is vital, the steadfast attitude within the occupied territories, and assure it.

4. To make good war-damages of the Arab States, and to heighten the spirit of struggle and the combat capacity of the countries involved in the confrontation.

d. Political

Political activity complements the military campaign, and is regarded as its continuation, all as part of our struggle against the enemy. As a direct result of the positions of States toward the just struggle of Arabs, the Conference resolves.

Sumber : <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/arabsum73.html>



Lampiran 3 (Konstitusi 11 September 1971)

Part Two: The Press

Art.206: The Press is a popular, independent authority exercising its mission in accordance with the stipulations of the Constitution and the law.

Art.207: The Press shall exercise its true mission freely and independently in the service of society through all means of expression.

It shall thus express trends of public opinion, while contributing to its formation and orientation within the framework of the basic components of society, the safeguard of the liberties, rights and public duties and respect of the sanctity of the private lives of citizens, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Art.208: The freedom of the press is guaranteed and press censorship is forbidden. Also forbidden is to threaten, suppress, or foreclose a newspaper through administrative measures, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Art.209: The freedom to issue newspapers and their ownership by public or private or political judicial persons or by political parties is safeguarded in accordance with the law.

The financing and ownership of newspapers are subject to the supervision of the people, as stipulated in the Constitution and defined by law.

Art.210: Journalists have the right to obtain news and information according to the regulations set by law.

Their activities are not subject to any authority other than the law.

Art.211: The Supreme Council of the Press shall deal with matters concerning the press.

The law shall define its composition, competencies and its relationship with the State authorities.

The Supreme Press Council shall exercise its competencies with a view to consolidating the freedom and independence of the press, to uphold the basic foundations of society, and to guarantee sound of national unity and social peace as stipulated in the constitution and defined by law.

Sumber :

http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/chp_seven/part_two.aspx

**Constitution
Of The Arab Republic of Egypt**

PART ONE
THE STATE

Article 1

The Arab Republic of Egypt is a democratic, socialist State based on the alliance of the working forces of the people.
The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realisation of its comprehensive unity.

Article 2

Islam is the religion of the state and Arabic its official language.
Islamic jurisprudence is the principal source of legislation.

Article 3

Sovereignty is for the people alone they are the source of authority.
The people shall exercise and protect this sovereignty, and safeguard national unity in the manner specified in the Constitution.

Article 4

The economic foundation of the Arab Republic of Egypt is a socialist democratic system based on sufficiency and justice in a manner preventing exploitation, conducive to liquidation of income differences, protecting legitimate earnings, and guaranteeing the equity of the distribution of public duties and responsibilities.

Article 5

The political system of the Arab Republic of Egypt is a multiparty one, within the framework of the basic elements and principles of the Egyptian society as stipulated in the Constitution (Political parties are regulated by law).

Article 6

The Egyptian nationality is defined by the law.

PART TWO

BASIC CONSTITUENTS OF THE SOCIETY

CHAPTER 1

Social and Moral Constituents Article 7

Social solidarity is the basis of the society.

Article 8

The State shall guarantee equality of opportunity to all citizens.

Article 9

The family is the basis of the society founded on religion, morality and patriotism. The State is keen to preserve the genuine character of the Egyptian family-with what it embodies of values and traditions-while affirming and developing this character in the relations within the Egyptian society.

Article 10

The State shall guarantee the protection of motherhood and childhood, take care of children and youth and provide the suitable conditions for the development of their talents.

Article 11

The State shall guarantee the proper coordination between the duties of woman towards the family and her work in the society, considering her equal with man in the fields of political, social, cultural and economic life without violation of the rules of Islamic jurisprudence.

Article 12

The society shall be committed to safeguarding and protecting morals, promoting the genuine Egyptian traditions and abiding by the high standards of religious education, moral and national values, historical heritage of the people, scientific facts, socialist conduct and public morality within the limits of the law.

The State is committed to abiding by these principles and promoting them.

Article 13

Work is right, a duty and an honour ensured by the State.

Workers who excel in their field of work shall receive the appreciation of the State and the society.

No work shall be imposed on the citizens, except by virtue of the law, for the performance of a public service and in return for a fair remuneration.

Article 14

Public offices are the right of all citizens and an assignment for their occupants in the service of the people.

The State guarantees their (the occupants) protection and the performance of their duties in safeguarding the interests of the people.

They may not be dismissed by other than the disciplinary way, except in the cases specified by the law.

Article 15

The war veterans, those injured in war or because of it, and the wives and children of those killed shall have priority in work opportunities according to the law.

Article 16

The State shall guarantee cultural, social and health services, and work to ensure them for the villages in particular in an easy and regular manner in order to raise their standard.

Article 17

The State- shall guarantee social and health insurance services and all the citizens have the right to pensions in cases of incapacity, unemployment and old-age, in accordance with the law.

Article 18

Education is a right guaranteed by the State.

It is obligatory in the primary stage and the State shall work to extend obligation to other stages.

The State shall supervise all branches of education and guarantee the independence of universities and scientific research centres, with a view to linking all this with the requirements of society and production.

Article 19

Religious education shall be a principal subject in the courses of general education.

Article 20

Education in the State educational institutions shall be free of charge in its various stages.

Article 21

Combating illiteracy shall be a national duty for which all the people's energies should be mobilized.

Article 22

The institution of civil titles shall be prohibited.

CHAPTER II Economic Constituents Article 23

The national economy shall be organised in accordance with a comprehensive development plan which ensures raising the national income, fair distribution, raising the standard of living, eliminating unemployment, increasing work opportunities, connecting wages with production, fixing a minimum and a maximum limit for wages in a manner which guarantees lessening the disparities between incomes.

Article 24

The people shall control all the means of production and direct their surplus in accordance with the development plan laid down by the State.

Article 25

Every citizen shall have a share in the national revenue to be defined by the law in accordance with his work or his unexploiting ownership

Article 26

The workers shall have a share in the management and profits of the projects. They are committed to the development of production and the implementation of the plan in their production units, in accordance with the law. protecting the means of production is a national duty.

Workers shall be represented on the boards of directors of the public sector units by at least 50% of the number of members of these boards. The law shall guarantee for the small farmers and small craftsmen 80% of the membership on the boards of directors of the agricultural CO-operatives and industrial cooperatives.

Article 27

Beneficiaries shall participate in the management of the services projects of public interest and their supervision in accordance with the law.

Article 28

The State shall look after the CO-operative establishments in all their forms and encourage handicrafts with a view to developing production and raising income. The State shall endeavour to consolidate the agricultural cooperatives according to modern scientific bases.

Article 29

Ownership shall be under the supervision of the people and the protection of the State.

There are three kinds:
public ownership, cooperative ownership and private ownership.

Article 30

Public ownership is the ownership of the people and it is confirmed by the continuous consolidation of the public sector.

The Public sector shall be the vanguard of progress in all spheres and shall assume the main responsibility in the development plan.

Article 31

Co-operative ownership is the ownership of the co-operative societies. The law guarantees its protection and self-management.

Article 32

Private ownership shall be represented by the unexploiting capital. The law organises the performance of its social function in the service of national economy within the framework of the development plan without deviation or exploitation. It may not be in conflict, in the ways of its use, with the general welfare of the people.

Article 33

Public ownership shall have its sanctity, and its protection and consolidation is the duty of every citizen in accordance with the law, as it is considered the mainstay of the strength of the homeland, a basis for the socialist system and a source of prosperity of the people.

Article 34

Private ownership shall be safeguarded and may not be put under sequestration except in the cases specified in the law and with a judicial decision. It may not be expropriated except for the general good and against a fair compensation in accordance with the law. The right of inheritance is guaranteed in it.

Article 35

Nationalisation shall not be allowed except for considerations of public interest, in accordance with a law and against a compensation.

Article 36

General sequestration of funds shall be prohibited.

Private sequestration shall not be allowed except with a judicial decision.

Article 37

The law shall fix the maximum limit of land ownership with a view to protecting the farmer and the agricultural labourer from exploitation and asserting the authority of the alliance of the people's working powers at the level of the village.

Article 38

The tax system shall be based on social justice.

Article 39

Saving is a national duty protected, encouraged and organised by the State.

PART THREE
PUBLIC FREEDOMS, RIGHTS AND DUTIES

Article 40

All citizens are equal before the law.
They have equal public rights and duties without discrimination between them due to race, ethnic origin, language, religion or creed.

Article 41

Individual freedom is a natural right and shall not be touched.
Except in cases of a flagrant delicate no person may be arrested, inspected, detained or his freedom restricted or prevented from free movement except by an or necessitated by investigations and preservation of the security of the society.

This order shall be given by the competent judge or the Public Prosecution in accordance with the provisions of the law.

The law shall determine the period of custody.

Article 42

Any person arrested, detained or his freedom restricted shall be treated in the manner concomitant with the preservation of his dignity.

No physical or moral harm is to be inflicted upon him.
He may not be detained or imprisoned except in places defined by laws organising prisons.

If a confession is proved to have been made by a person under any of the aforementioned forms of duress or coercion, it shall be considered invalid and futile.

Article 43

Any medical or scientific experiment may not be undergone on any person without his free consent.

Article 44

Homes shall have their sanctity and they may not be entered or inspected except by a causal judicial warrant prescribed by the law.

Article 45

The law shall protect the inviolability of the private life of citizens.
Correspondence, wires, telephone calls an other means of communication shall have their own sanctity and secrecy and may not be confiscated or monitored except by a causal judicial warrant and for a definite period according to the provisions of the law.

Article 46

The State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practice of religious rites.

Article 47

Freedom of opinion is guaranteed.

Every individual has the right to express his opinion and to publicise it verbally or in writing or by photography or by other means within the limits of the law.

Self-criticism and constructive criticism is the guarantee for the safety of the national structure.

Article 48

Freedom of the press, printing, publication and mass media shall be guaranteed. Censorship on newspapers is forbidden as well as notifying, suspending or cancelling them by administrative methods.

In a state of emergency or in time of war a limited censorship may be imposed on the newspapers, publications and mass media in matters related to public safety or purposes of national security in accordance with the law.

Article 49

The State shall guarantee the freedom of scientific research and literary, artistic and cultural invention and provide the necessary means for its realisation.

Article 50

No citizen may be prohibited from residing in any place and no citizen may be forced to reside in a particular place, except in the cases defined by the law.

Article 51

No citizen may be deported from the country or prevented from returning to it.

Article 52

Citizens shall have the right to permanent or temporary immigration. The law shall regulate this right and the measures and conditions of immigration and leaving the country.

Article 53

The right to political asylum shall be guaranteed by the State for every foreigner persecuted for defending the peoples' interests, human rights, peace or justice. The extradition of political refugees is prohibited.

Article 54

Citizens shall have the right to peaceable and unarmed private assembly, without the need for prior notice.

Security men should not attend these private meetings.

Public meetings, processions and gatherings are allowed within the limits of the law.

Article 55

Citizens shall have the right to form societies as defined in the law.

The establishment of societies whose activities are hostile to the social system, clandestine or have a military character is prohibited.

Article 56

The creation of syndicates and unions on a democratic basis is a right guaranteed by law, and should have a moral entity.

The law regulates the participation of syndicates and unions in carrying out the social programmes and plans, raising the standard of efficiency, consolidating the socialist behavior among their members, and safeguarding their funds.

They are responsible for questioning their members about their behavior in exercising their activities according to certain codes of morals, and for defending the rights and liberties of their members as defined in the law.

Article 57

Any assault on individual freedom or on the inviolability of private life of citizens and any other public rights and liberties guaranteed by the Constitution and the law shall be considered a crime, whose criminal and civil lawsuit is not liable to prescription.

The State shall grant a fair compensation to the victim of such an assault.

Article 58

The defense of the motherland is a sacred duty, and conscription is obligatory in accordance with the law.

Article 59

Safeguarding, consolidating and preserving the socialist gains is a national duty.

Article 60

Protecting national unity and keeping State secrets is the duty of every citizen.

Article 61

Payment of taxes and public imports is a duty, in accordance with the law.

Article 62

Citizens shall have the right to vote, nominate and express their opinions in referendums according to the provisions of the law.

Their participation in public life is a national duty.

Article 63

Every individual has the right to address public authorities in writing and with his own signature.

Addressing public authorities should not be in the name of groups, with the exception of disciplinary organs and moral personalities.

PART FOUR

SOVEREIGNTY OF THE LAW

Article 64

Sovereignty of the law shall be the basis of rule in the State.

Article 65

The State shall be subject to law.

The independence and immunity of the judiciary are two basic guarantees to safeguard rights and liberties.

Article 66

Penalty shall be personal.

There shall be no crime or penalty except by virtue of the law.

No penalty shall be inflicted except by a judicial sentence.
Penalty shall be inflicted only for acts committed subsequent to the promulgation
of the law prescribing them.

Article 67

Any defendant is innocent until he is proved guilty before a legal court, in which
he is granted the right to defend
himself.

Every person accused of a crime must be provided with counsel for his defense.

Article 68

The right to litigation is inalienable for all, and every citizen has the right to refer
to his competent judge.

The State shall guarantee the accessibility of the judicature organs to litigants, and
the rapidity of statuting on
cases.

Any provision in the law stipulating the immunity of any act or administrative
decision from the control of the
judicature is prohibited.

Article 69

The right of defense in person or by mandate is guaranteed.

The Law shall grant the financially incapable citizens the means to resort to
justice and defend their rights.

Article 70

No penal lawsuit shall be sued except by an order from a judicature organ and in
cases defined by the law.

Article 71

Any person arrested or detained should be informed, forthwith with the reasons
for his arrest or detention.

He has the right to communicate, inform, and ask the help of anyone as prescribed
in the law.

He must be faced, as soon as possible, with the charges directed against him.

Any person may lodge a complaint to the courts against any measure taken to
restrict his individual freedom.

The law regulates the right of complaint in a manner ensuring a ruling regarding it
within a definite period, or else
release is imperative.

Article 72

Sentences shall be passed and executed in the name of the people.

Likewise, refraining to execute sentences or obstructing them on the part of the
concerned civil servants Is
considered a crime punishable by law.

In this case, those whom the sentence is in favour of, have the right to sue a direct
penal lawsuit before the
competent court.

Part Five

System of Government

CHAPTER ONE The Head of State Article 73

The Head of State is the President of the Republic.

He shall assert the sovereignty of the people, respect the Constitution and the supremacy of the law, safeguard the national unity and the socialist gains, and maintain the boundaries between authorities in a manner to ensure that each shall perform its role in the national action.

Article 74

If any danger threatens the national unity or the safety of the motherland or obstructs the constitutional role of the State institutions, the President of the Republic shall take urgent measures to face this danger, direct a statement to the people and conduct a referendum on these measures within sixty days of its adoption.

Article 75

The person to be elected President of the Republic must be an Egyptian born to Egyptian parents and enjoy civil and political rights.

His age must not be less than 40 Gregorian years.

Article 76

The People's Assembly shall nominate the President of the Republic.

The nomination shall be referred to the people for a plebiscite.

The nomination to the post of President of the Republic shall be made in the People's Assembly upon the proposal of at least one third of its member.

The candidate who wins two-thirds of the votes of the Assembly members shall be referred to the people for a plebiscite.

If none of the candidates obtains the said majority the nomination process shall be repeated two days after the first vote.

The candidate winning the votes with an absolute majority of the Assembly members shall be referred to the citizens for a plebiscite.

The candidate shall be considered President of the Republic when he obtains an absolute majority of the votes cast in the plebiscite.

If the candidate does not obtain this majority, the Assembly shall nominate another candidate and the same procedure shall be followed.

Article 77

The term of the Presidency is six Gregorian years starting from the date of the announcement of the result of the plebiscite.

The President of the Republic may be re-elected for other successive terms.

Article 78

Procedures for the choice of a new President of the Republic shall begin sixty days before the expiration of the term of the President in office.

The new President shall be selected at least one week before the expiration of the term.

Should this term expire without the choice of the new President being made for any reason whatsoever, the former President shall continue to exercise his functions until his successor is elected.

Article 79

Before exercising his powers, the President shall take the following oath before the People's Assembly.

"I swear by Almighty God to uphold the Republican system with loyalty, to respect the Constitution and the law, to look after the interests of the people fully and to safeguard the independence and territorial integrity of the motherland".

Article 80

The salary of the President of the Republic shall be fixed by law. Any amendment in the salary shall not come into force during the Presidential term in which it is decided upon.

The President of the Republic may not receive any other salary or remuneration.

Article 81

During his term the President of the Republic may not exercise any free profession or undertake any commercial, financial or industrial activity.

Nor may he acquire or take on lease any State property, sell to or exchange with the State any property of his whatsoever.

Article 82

If on account of any temporary obstacle the President of the Republic is unable to carry out his functions, he shall delegate his powers to a vice-president.

Article 83

In case of resignation, the President shall address the letter of resignation to the People's Assembly.

Article 84

In case of the vacancy of the Presidential Office or the permanent disability of the President of the Republic, the President of the People's Assembly shall temporarily assume the Presidency; and, if at that time, the People's Assembly is dissolved, the President of the Supreme Constitutional Court shall take over the Presidency, however, on condition that neither one shall nominate himself for the Presidency.

The People's Assembly shall then proclaim the vacancy of the office of President. The President of the Republic shall be chosen within a maximum period of sixty days from the day of the vacancy of the Presidential Office.

Article 85

Any charge against the President of high treason or of committing a criminal act shall be made upon a proposal by at least one-third of the members of the People's Assembly.

No impeachment shall be issued except upon the approval of a majority of two-thirds of the Assembly members.

The President shall be suspended from the exercise of his duty as from the issuance of the impeachment.

The Vice-President shall take over the Presidency temporarily until the decision concerning the impeachment is taken.

The President of the Republic shall be tried by a special tribunal set up by law.

The law shall also organise the trial procedures and define the penalty.

If he is found guilty, he shall be relieved of his post, without prejudice to other penalties.

CHAPTER II THE LEGISLATURE The People's Assembly Article 86

The People's Assembly shall exercise the legislative power and approve the general policy of the State, the general plan of economic and social development and the general budget of the State.

It shall exercise control over the work of the executive authority in the manner prescribed by the Constitution.

Article 87

The law shall determine the constituencies into which the State shall be divided and the number of elected members of the People's Assembly must be at least 350 persons, of which one half at least must be workers and farmers elected by direct secret public balloting.

The definition of the worker and the farmer shall be made by law.

The President of the Republic may appoint a number of members not exceeding ten.

Article 88

The necessary conditions stipulated in the members of the People's Assembly shall be defined by law.

The rules of election and referendum shall be determined by law, while the ballot shall be conducted under the supervision of members of a judiciary organ.

Article 89

Employees of the State and of the public sector nominate themselves for membership in the People's Assembly.

The member of the people's Assembly shall devote himself to membership in the Assembly except in cases specified by law.

His post or work shall be held over for him in accordance with the provisions of the law.

Article 90

The member of the People's Assembly shall take the following oath before the Assembly before entering upon his duties:

"I swear by God Almighty, that I shall preserve the safety of the nation and the Republican regime, shall attend to the interests of the people and shall respect the Constitution and law".

Article 91

Members of the People's Assembly shall receive a remuneration determined by the law.

Article 92

The duration of the People's Assembly term is five Gregorian years from the date of its first meeting.

Elections for renewal of the Assembly shall take place within the sixty days preceding the termination of the term.

Article 93

The People's Assembly shall be the only authority competent to decide upon the validity of its members.

A Court of Causation shall be competent to investigate the validity of contestation presented to the Assembly, on

being referred to it by the President of the Assembly.

The contestation shall be referred to the Court of Cassation within fifteen days as from the date on which the

Assembly was informed of it, while the investigation shall be completed within ninety days from the date on which

the contestation is referred to the Court of Cassation.

The result of the investigation and the decision reached by the Court shall be submitted to the Assembly to decide upon the validity of the contestation within sixty days from the date of submission of the result of the investigation to the Assembly.

The membership will not be deemed invalid except by a decision taken by a majority of two-thirds of the Assembly members.

Article 94

If the seat of a member becomes vacant before the end of his term, a successor shall be elected or appointed to it, within sixty days from the date of the communication to the Assembly of the occurrence of the vacancy.

The term of the new member shall extend until the end of the term of his predecessor.

Article 95

No member of the People's Assembly shall, during his mandate, purchase or rent any State property; or lease or sell to the State or barter with it regarding any part of his property, or conclude a contract with the State in his capacity as entrepreneur, importer or contractor.

Article 96

No membership in the People's Assembly shall be revoked except on the grounds of loss of confidence or status or of one of the conditions of membership, or the loss of the member's status as a worker or farmer upon which he was elected or the violation of the member's mandate.

The membership shall be deemed invalid on the grounds of a decision taken by a majority of two-thirds of the

Assembly members.

Article 97

The People's Assembly alone may accept the resignation of its members .

Article 98

Members of the People's Assembly shall not be censured for any opinions or thoughts expressed by them in the performance of their tasks in the Assembly or its committees.

Article 99

No member of the People's Assembly shall be subject to a criminal prosecution without the permission of the Assembly except in cases of flagrant delicto.

If the Assembly is not in session, the permission of the President of the Assembly must be taken.

The Assembly must be notified of the measures taken in its first subsequent session.

Article 100

The seat of the People's Assembly shall be Cairo.

However, in exceptional circumstances, it may meet another city, at the request of the President of the Republic or the majority of the Assembly members.

Any meeting of the Assembly in other than its designated seat is illicit and the resolutions passed in it shall be considered invalid.

Article 101

The President of the Republic shall convoke the People's Assembly for its ordinary annual session before the second Thursday of November.

If it is not convoked, the Assembly shall meet, by force of the Constitution, on the said day.

The session of the ordinary meeting shall continue for at least seven months.

Article 102

The President of the Republic may call the People's Assembly to an extraordinary meeting, in case of necessity, or upon a request signed by a majority of the Assembly members.

The President of the Republic shall announce the dismissal of the extraordinary meeting.

Article 103

The People's assembly shall elect, in the first meeting of its ordinary annual session, a president and a vice-president for the term of the session.

If the seat of anyone of them is vacated, the Assembly shall elect a replacement, whose term will last until the end of his predecessors term.

Article 104

The People's Assembly shall lay down its own rules of procedure organising the manner of the fulfilment of its tasks.

Article 105

The people's Assembly alone shall be entitled to preserve order inside it.
The President of the Assembly shall be entrusted with this task.

Article 106

The meetings of the People's Assembly shall be public.
However, a meeting in camera may be held at the request of the president of the Republic or of the government or of its Prime Minister or at least twenty of its members.
The Assembly shall then decide whether the debate on the question submitted to it shall take place in a public meeting or in a meeting in camera.

Article 107

The meeting of the Assembly shall be considered invalid if the majority of its members are not present.

The resolution of the Assembly shall be adopted by an absolute majority of the attending members, in cases other than those for which a specific majority is required.

Every article of the draft laws shall be put to a vote.

In case of a tie vote, the question on which the debate had taken place shall be rejected.

Article 108

The president of the Republic shall have the right, in case of necessity or in exceptional cases and on the authorisation of the People's Assembly upon the approval of a majority of two thirds of its members, to issue resolutions having the force of law.

The authorisation must be for a limited period of time during which the subjects of the resolutions and the grounds upon which they are based, must be determined.

The resolutions must be submitted to the People's Assembly in the first meeting after the end of the authorisation period.

If they are not submitted or if they are submitted and not approved by the Assembly, they shall cease to have the force of law.

Article 109

The President of the Republic and every member of the People's Assembly shall have the right to propose laws.

Article 110

Every draft law shall be referred to a committee of the Assembly which will study it and submit a report concerning it.

Draft laws presented by members of the People's Assembly shall not be referred to this committee unless they are first referred to a special committee which will study them and give an opinion on the suitability of their consideration by the Assembly and after the Assembly decides to consider them.

Article 111

Every draft law proposed by a member and rejected by the Assembly cannot be presented again in the course of the same session.

Article 112

The president of the Republic shall have the right to promulgate laws or object to them.

Article 113

If the President of the Republic objects to a draft law ratified by the People's Assembly he shall refer it back to the Assembly within thirty days from the Assembly's communication of it. If the draft law is not referred back within this period, it is considered a law shall be promulgated.

If it is referred back to the Assembly on the said date and approved once again by a majority of two-thirds of the members, it shall be considered a law and shall be promulgated.

Article 114

The people's Assembly shall approve the general plan for economic and social development.

The manner of the preparation of the plan and of its submission to the people's Assembly shall be determined by law.

Article 115

The draft general budget shall be submitted to the people's Assembly at least two months before the beginning of the fiscal year.

It shall be considered in effect after approval.

The draft budget shall be voted upon title by title and shall be promulgated by a law.

The people's Assembly may not effect any modification in the draft budget except with the approval of the government.

In case the ratification of the new budget does not take place before the beginning of the fiscal year, the old budget shall be acted on pending such ratification.

The manner of the preparation of the budget as well as the determination of the fiscal year shall be determined by law.

Article 116

The approval of the people's Assembly shall be considered necessary for the transfer of any funds one title of the budget to another title, as well as for any expenditure not included in it or excess of its estimates, and this shall be issued by a law.

Article 117

The provisions regulating the budgets and accounts of public organisations and organisms shall be prescribed by law.

Article 118

The final account of the State budget shall be submitted to the people's Assembly within a period not exceeding one year from the date of the expiration of the fiscal year.

It shall be voted-upon title by title and issued by a law.

The annual report of the Central Agency for Accounting and its observations must be submitted to the People's Assembly.

The Assembly has the right to demand from the Central Agency for Accounting any data or other pertinent reports.

Article 119

The imposition, modification or abolition of general taxes cannot be effected except in the cases decreed by law.

No one may be exempted from their payment except in the cases specified by law. No one may be asked to pay additional taxes or imposts except in the cases specified by law.

Article 120

The basic rules for collection of public funds and the procedure for their disbursement shall be regulated.

Article 121

The Executive Authority shall not contract a loan or bind itself to a project entailing expenditure of funds from the State Treasury in the course of a subsequent period, except with the approval of the People's Assembly.

Article 122

The rules governing the granting of salaries, pensions, indemnities, subsidies and bonuses from the state Treasury shall be determined by law which shall also regulate the cases excepted from these rules, and the authorities charged with their application.

Article 123

The rules and procedures for granting concessions relating to investment of the sources of natural wealth and of public utilities shall be determined by law; disposal, free of charge, of real estate properties belonging to the State or the ceding of moveable properties of the State and the rules and problems relating to them shall also be determined by law.

Article 124

Every member of the People's Assembly shall be entitled to address questions to the Prime Minister or any of his deputies or the Ministers or their deputies concerning matters within their jurisdiction.

The Prime Minister, his deputies, the Ministers and the persons they delegate on their behalf shall answer the questions put to them by members.

The member may withdraw his question at any time; this same question may not be transformed into an

interpellation in the same session.

Article 125

Every member of the People's Assembly shall be entitled to address
Inteprellations to the Prime Minister or his
deputies or the Ministers or their deputies concerning matters within their
jurisdiction.

Debate on an interpllation shall take place at least seven days after its submission,
except in the cases of urgency
as decided by the Assembly and with the government's consent.

Article 126

The Ministers shall be responsible collectively for the general policy of the State
before the People's Assembly;
also every Minister shall be responsible for the acts of his Ministry.
The People's Assembly may decide to withdraw its confidence from any of the
Prime Minister's deputies or from
many of the Ministers or their deputies.

A motion of no confidence should not be submitted except after an interpellation.
Such a motion should be proposed by one-tenth of the Assembly's members.
The Assembly should not decide on such a motion until after at least three days
from the date of its presentation.

Sumber : <http://www.uam.es/otroscentros/medina/egypt/egypolcon.htm>

DAFTAR GAMBAR

Gambar1



Sumber: <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm>

Gambar 2



<http://hamaslovers.wordpress.com/2009/05/09/israel-lenyap-dari-peta-dunia/>

Gambar 3



SAM - 2 (Devina) missile system

Type : medium range

production : Russian

Engagement range : 34 km

Engagement altitude : up to 27 km

Target speed : up to 1100 m/s

Others : additional improvements to counter jamming and to enhance the system capabilities against modern air threats

Sumber : <http://www.mmc.gov.eg/>

Gambar 4



SAM - 2 (Volga) missile system

Type : medium range

production : Russian

Engagement range : 43 km

Engagement altitude : up to 30 km

arget speed : up to 1100 m/s

Others : additional improvements to counter jamming and to enhance the system capabilities against modern air threats

Sumber : <http://www.mmc.gov.eg/>

Gambar 5



SAM - 3 (Petchora) missile system

Type : medium range

production : Russian

Engagement range : 25 km

Engagement altitude : up to 18 km

Target speed : up to 750 m/s

Others : additional improvements to counter jamming and to enhance the system capabilities against modern air threats .

Sumber : <http://www.mmc.gov.eg/>

Gambar 6



SAM - 6 (Quadrat) missile system

Type : medium range

production : Russian

Engagement range : 24 km

Engagement altitude : up to 10 km

Target speed : up to 600 m/s

Sumber : <http://www.mmc.gov.eg/>

Gambar 7



Meriam anti serangan udaral ZSU-23/4 milik Syria

Sumber : <http://forum.detik.com/showthread.php?t=54660&page=40>

Gambar 8



Nama: A-4 Skyhawk

Tipe: Pembom-Tempur

Pabrik: McDonnell Douglas

Perancang: Ed Heinemann

Pertama terbang: 22 Juni 1954

Diperkenalkan: Oktober 1956

Mesin: Curtis-Wright J65-W-16A

Senjata utama: dua kanon senapan mesin kaliber 20mm

Kelemahan: Mudah diserang rudal darat-udara

Sumber : <http://info-dirgantara.blogspot.com/2008/08/4-skyhawk.html>

Gambar 9

Presiden Anwar Sadat



<http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/15/100245/77/21/Anwar-Sadat-Menjadi-Presiden-Mesir>

Gambar 10

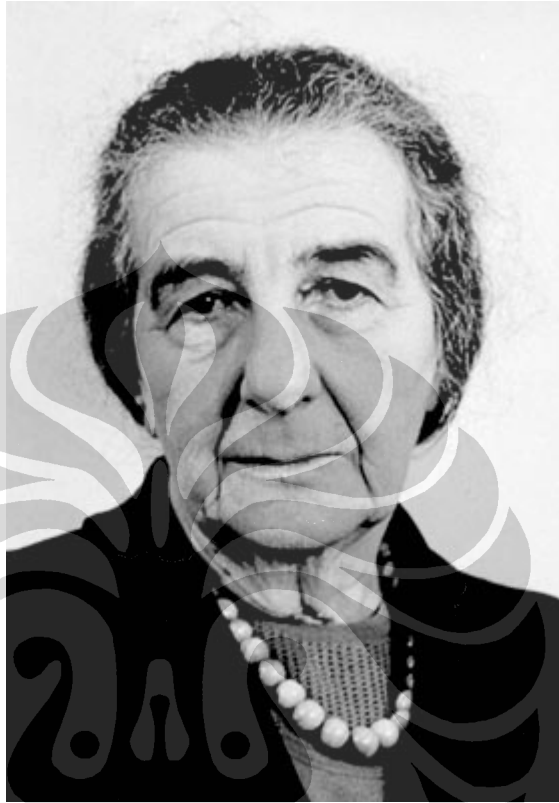
Saad el Shazly



<http://www.el-shazly.com/>

Gambar 11

Golda Meir



http://www.knesset.gov.il/mk/eng/ShowPic_eng.asp?mk_individual_id_t=685

Gambar 12

Moshe Dayan



http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/fooc50/4135816.stm

Gambar 13

David Elazar



http://dover.idf.il/IDF/English/about/staff/through_the_ages/default.htm